

**STRATEGI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
(ADD) DALAM UPAYA PENINGKATAN EKONOMI  
MASYARAKAT DESA BUNTU AWO, KECAMATAN  
WALENRANG UTARA, KABUPATEN LUWU**

*Skripsi*

*Diajukan untuk memenuhi salah satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) pada program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri palopo*



**IAIN PALOPO**

**Diajukan Oleh**

**AMRITA SARI**

20 0402 0016

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

**STRATEGI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
(ADD) DALAM UPAYA PENINGKATAN EKONOMI  
MASYARAKAT DESA BUNTU AWO, KECAMATAN  
WALENRANG UTARA, KABUPATEN LUWU**

*Skripsi*

*Diajukan untuk memenuhi salah satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) pada program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri palopo*



**IAIN PALOPO**

**Diajukan Oleh**

**AMRITA SARI**

20 0402 0016

**Pembimbing:**

**Hamida, S.E, Sy., M.E.Sy.**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Amrita Sari  
NIM : 20 0402 0016  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



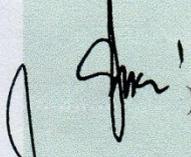
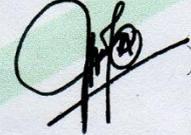
Amrita Sari  
NIM: 20 0402 0016

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul Strategi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Amrita Sari Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2004020016, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 Miladiyah bertepatan dengan 2 Dzulqaidah 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 30 April 2025

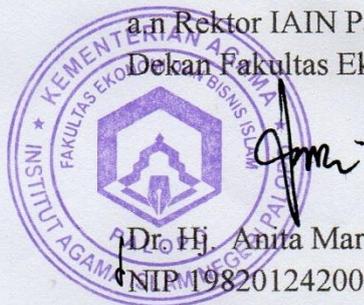
### TIM PENGUJI

- |  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang      | (  )  |
| 2. Ilham, S. Ag., M. A.                  | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.        | Penguji I         | (  ) |
| 4. Andi Musniwan Kasman, S.E., M.M.      | Penguji II        | (  ) |
| 5. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy.              | Pembimbing        | (  ) |

### Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.  
NIP. 198201242009012006



Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.  
NIP. 198912072019031005

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Strategi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam Upaya peningkatan ekonomi Masyarakat desa buntu awo,kecamatan walenrang utara,kabupaten luwu (Studi pada Mahasiswa FEBI IAIN Palopo)” setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat, guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi dalam bidang perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tuaku yang tercinta yang berjasa dalam hidup saya, Bapak Amir D dan Ibu Rosmawati,Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan namun beliau yang telah bekerja keras,memberi dukungan nasehat, mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang,serta doa yang selalu mengiringi Langkah saya,penulis yakin 100% bahwa doa kedua orang

tuaku telah menyelamatkanku dalam menjalani hidup, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai meraih gelar sarjana, kalian sangat berarti semoga Allah swt selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan aamiin, Terima kasih tak terhingga kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dr. Hj. Anita Marwing , S.HI., M.HI. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr. Fasiha, S.E.I., M.EI., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muzayyanah Jabani, S.T., M.M selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Muh. Ilyas, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Edi Indra Setiawan, S.E., M.M. selaku Ketua program studi Perbankan Syariah dan Umar, S.E., M.SE. selaku sekretaris program studi Manajemen Bisnis Syariah, beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi.
4. Dr Takdir, M.K.M., S.H., M.H., M.Kes selaku Penasehat Akademik.
5. Hamida, S.E.SY., M.E.S.Y selaku pembimbing yang mana telah bersedia dan sabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun penelitian ini.

6. Edi Indra Setiawan,S.E., M.M. selaku dosen penguji I dan Andi Musniwan Kasman, SE., M.M. selaku dosen penguji II yang telah memberikan kritikan dan arahan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada saudara-saudari peneliti Amita sari, Afgan anggara saputra, terima kasih banyak karena telah memberikan dukungan dan masukan untuk adik perempuan satu-satumu ini selama perkuliahan hingga tahap ini.
9. Segenap keluarga besar saya My family Donaja yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan motivasi selama penyusunan skripsi ini terutama sepupu saya yang sudah saya anggap sebagai saudara saya Sintia dan Uci almaysa yang selalu mendengar curhatan dan keluh kesah saya.
10. Kepada teman-teman saya dari SD sampai sekarang Akmal,Amrina M,Desi Karmila,Reskia, Rafika, Puja Lestari, Arniati, Nurfadila, Rani, Rima dan Rachil Farahdiba, Terima kasih atas segala dukungan, motivasi, pengalaman, dan ilmu yang dijalani bersama semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan sukses selalu
11. Kepada Desi Karmila terima kasih atas bantuan dan waktu nya yang telah menemani dan menjadi beban saya selama tahap proses penyusunan skripsi sampai pada tahap ini.
12. Kepada semua teman-teman seperjuangan Mahasiswa Perbankan syariah angkatan 2020 terkhusus kelas PBS/A yang tidak bisa saya sebutkan satu-

persatu terimakasih. Serta teman-teman yang telah memberikan warna dalam perjalanan kuliah saya hingga penyusunan skripsi ini.

13. Kepada teman KKN peneliti yang memberikan banyak pengalaman ber kkn yang banyak mengajarkan banyak ilmu baru, saya ucapkan terima kasih karena memberikan pengalaman baru dalam hidup saya dan mendapatkan teman baru seperti kalian yang mengasikan.
14. Kepada partner penulis Bripda Ridwan yang selalu menemani dan menjadi support system penulis, terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulis skripsi ini,memberikan dukungan, doa, semangat, motivasi, terima kasih telah menjadi bagian dari hidup saya, harapan saya semoga kita bisa sukses Bersama sesuai dengan apa yang kita impikan aamiin.
15. Terimakasih untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsi kepada penulis selama kuliah dan penyelesaian skripsi ini.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama, dan amal bakti yang tak terhingga dari berbagai pihak. mendapat balasan yang layak disisi Allah swt. Aamiin Allahumma Aamiin. Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan ketegangan dan tekanan namun dapat dilewati dengan baik.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap yang membaca. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis menerima dengan hati yang lapang dan ikhlas.

Palopo, 18 februari 2025

Penulis,

Amrita Sari

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftarh uruf Bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah

ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:



#### 4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk tā' marbūtah ada dua, yaitu tā' marbūtah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā' marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fādilah  
الْحِكْمَةُ : al-hikmah

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā  
نَجَّيْنَا : najjainā  
الْحَقُّ : al-haqq  
نُعِمْ : nu'ima  
عَدُوُّ : 'aduwwun

Jika huruf **ع** ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi **ī**.

Contoh:

**عَلِيٌّ** : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau A’ly)

**عَرَبِيٌّ** : ‘Arabī (bukan A’rabiyy atau ‘Arabiy)

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ال** (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, **al-**, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

**الشَّمْسُ** : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

**الزَّلْزَلَةُ** : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

**الْفَلْسَفَةُ** : al-falsafah

**الْبِلَادُ** : al-bilādu

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna  
النَّوْعُ : al-nau'  
شَيْءٌ : syai'un  
أُمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudāfilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينُ اللَّهِ  
*dīnullāh billāh*

adapun tā'marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, diterasliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ  
*num ji ranmaulāh*

## 10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fihi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfi

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= Q.S An-Nisa/4

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xx</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	12
B. Landasan Teori .....	15
C. Kerangka Pikir .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Lokasi Penelitian .....	39
C. Fokus Penelitian .....	40
D. Defenisi Istilah .....	41
E. Data dan Sumber Data .....	41
F. Instrumen Penelitian .....	42
G. Teknik Pengumpulan Data .....	43
H. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	44
I. Teknik Analisis Data.....	46

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
A. Deskripsi Data .....	49
B. Hasil dan Pembahasan .....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Simpulan.....	87
B. Implikasi .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>

## ABSTRAK

**Amrita Sari, 2025.** “*Strategi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu*”. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hamida.

Skripsi ini membahas tentang Strategi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Adapun metode pengumpulan data yaitu: Observasi (Pengamatan), Wawancara, Dokumentasi. Adapun subjek atau informan dari penelitian ini yaitu Kepala Desa Buntu Awo, Staf Desa, dan Masyarakat Desa Buntu Awo. Berdasarkan hasil penelitian ini Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

**Kata Kunci :** Dana Desa, Ekonomi Masyarakat, Strategi Pengelolaan.

## ABSTRACT

**Amrita Sari, 2025.** “*Village Fund Allocation (VFA) Management Strategy in Efforts to Improve the Economy of the Buntu Awo Village Community, North Walenrang District, Luwu Regency*”. Thesis of Islamic Banking Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business. State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Hamida.

This thesis discusses the Strategy for Managing Village Fund Allocation (VFA) in Efforts to Improve the Economy of the Buntu Awo Village Community, North Walenrang District, Luwu Regency. This study aims to determine the Strategy for Managing Village Fund Allocation (VFA) in Efforts to Improve the Economy of the Buntu Awo Village Community, North Walenrang District, Luwu Regency. The type of research used is descriptive qualitative. The data collection methods are: Observation, Interview, Documentation. The subjects or informants of this study are the Head of Buntu Awo Village, Village Staff, and the Buntu Awo Village Community. Based on the results of this study, the Management of Village Fund Allocation (VFA) in Buntu Awo Village, North Walenrang District, has had a significant positive impact on improving the community's economy.

**Keywords:** Community Economy, Management Strategy, Village Funds.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah Indonesia setiap tahunnya terus melakukan upaya terjadinya peningkatan pertumbuhan nasional dengan memajukan pembangunan infrastruktur yang ada di perkotaan maupun perdesaan. Hal ini dilakukan guna mendukung program pembangunan nasional agar terjadinya akselerasi dalam kegiatan pembangunan. Pembangunan adalah sebuah proses terjadinya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan yang sebelumnya belum ada menjadi ada, atau yang sebelumnya belum berpunya menjadi berpunya.

Dalam kegiatan pembangunan, pemerintah melakukan upaya-upaya agar terjadinya perubahan kehidupan yang ada dalam suatu wilayah. Pemerintah Desa harus maju sejalan dengan pertumbuhan masyarakatnya dan sekitarnya agar dapat menjalankan fungsinya dengan benar dan berhasil. Kegiatan ini telah dilakukan dengan melakukan transfer anggaran yang diperuntukan bagi pemerintah desa dalam bentuk dana desa.

Maksud pemberian dana desa (ADD) adalah sebagai bantuan atau dana untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa dan partisipasi untuk mendorong masyarakat bergotong royong dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya supaya tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri. Akan tetapi, dalam proses pengelolaan alokasi dana desa yang ada di desa Buntu Awo kurang

sesuai dengan prinsip pengelolaan alokasi dana desa sehingga berdampak belum efektifnya pencapaian tujuan alokasi dana desa itu sendiri.

Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa. Untuk dapat menjalankan peranannya yang efektif pemerintah desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan adanya dana desa ini diharapkan desa mampu melakukan proses pembangunan yang ada di wilayahnya agar terjadi peningkatan kehidupan masyarakat. Untuk supaya dana desa ini betul-betul dapat dimanfaatkan dengan baik, maka dana tersebut harus digunakan secara transparan, bertanggungjawab, bergotong royong, dan pelibatan secara langsung masyarakat dalam pembangunan.

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional riil dan meningkatkan produktivitas. Pembangunan ekonomi selalu di tunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya.<sup>1</sup> Kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan masyarakat seutuhnya dalam rangka meningkatkan usaha pemerataan pembangunan. Dengan berdasarkan pendekatan bahwa pembangunan didasarkan pada pembangunan yang dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan bantuan pemerintah maka adanya keseimbangan kewajiban yang dilakukan bersama pemerintah dan masyarakat secara seimbang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Fitri Amalia, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Widana Bhakti Persada Bandung, 2022), hal 2.

<sup>2</sup> Fitri Amalia, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Widana Bhakti Persada Bandung, 2022), hal 9.

Dalam hal ini pembangunan desa mengutamakan prinsip imbang kewajiban yang serasi antara keduanya, yaitu pemerintah memberi bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan.<sup>3</sup> Sedangkan masyarakat yang memberikan partisipasi dalam pembangunan berbentuk prakarsa dan swadaya gotong royong pada setiap pembangunan yang dilaksanakan.

Berkaca dari pembangunan masyarakat desa pada masa lalu, terutama di era orde baru, pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang di programkan negara secara sentralistik. Dimana pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah baik dengan kemampuan sendiri (dalam negeri) maupun dengan dukungan negara-negara maju dan organisasi-organisasi internasional.<sup>4</sup> Dalam mengoptimalkan potensi desa di Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, pemerintah daerah menggunakan alokasi dana desa dalam melakukan peningkatan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan sarana dan prasarana umum, maupun pembangunan non infrastruktur, seperti potensi daya, wisata, pendidikan, dan lain-lain. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan alokasi dana desa.

Untuk itu pemberdayaan di pedesaan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat karena diketahui bahwa semua masalah diperkotaan berasal dari desa.<sup>5</sup> Untuk itu pembangunan dilakukan dimulai dari desa dengan menggunakan dana desa, ADD serta melakukan pemberdayaan masyarakat, dana desa dipakai untuk membangun daerah pelosok guna menambah kemakmuran

---

<sup>3</sup> Christea Frisdiantara & Imam Mukhklis, *Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian Teoretis Dan Empiris*, Cetakan 1, (Malang: Universitas Kanjuruhan Malang, 2020), hal 10.

<sup>4</sup> I Ketut Gede Rudiarta, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa", Vol 1, No. 2, (2020), hal 64.

<sup>5</sup> Kartika Putri, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Dharma Bakti, 2020), hal 4.

penduduk desa, mengembangkan kualitas hidup masyarakat serta menanggulangi kemiskinan dengan mengutamakan penggunaan dana tersebut dipergunakan menjalankan rancangan serta kegiatan peningkatan kualitas desa.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan Alokasi dasar, dan Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.<sup>6</sup>

Desa diharuskan mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.<sup>7</sup> Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan belanja aparatur dan operasional Desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi Pendidikan, Pelatihan, Pembekalan, Studi Banding.
2. Biaya operasional Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan.
3. Biaya tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, tunjangan dan operasional BPD, Honor ketua RT dan RW serta penguatan kelembagaan RT / RW

---

<sup>6</sup> Azwardi & Sukanto, "Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 1, No 2. (Juni 2014) hal 30.

<sup>7</sup> Chabib Sholeh & Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung: Fokus Media, 2015), hal 54.

4. Biaya perawatan kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa.
5. Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan, pertanggungjawaban meliputi:
  - a. Pembuatan/Perbaikan monografi, peta dan lain-lain data dinding.
  - b. Penyusunan APBDes, LPPD dan LKPJ, pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).
  - c. Biaya lain-lain yang perlu dan mendesak, misalnya Penanganan keadaan darurat seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.<sup>8</sup>

Data alokasi dana desa di Desa Buntu Awo adalah sebesar 90% berdasarkan pemerataan alokasi dasar yaitu alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh desa tersebut dihitung dengan 90% dari anggaran dana desa. Sebesar 10% berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa. Sehingga membutuhkan beberapa cara untuk meningkatkan pengelolaan alokasi dana yang baik untuk peningkatan ekonomi masyarakat di desa. Dana yang didapatkan ini kemudian dalam proses pengalokasiannya dibagi ke dalam 4 aspek

---

<sup>8</sup> Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi & Suwondo, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6. (2014), hal 1203.

yaitu pemberdayaan, pembinaan, infrastruktur dan dana yang tak terduga. Keempat aspek ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Buntu Awo dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan cara membangun kemandirian dan ketentraman penduduk berdasarkan pengetahuan, dengan menggunakan sumber daya dengan pemilihan kebijaksanaan program, aktivitas, serta arahan yang sebanding berdasarkan akar persoalan dan kebutuhan yang diutamakan penduduk desa kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Pemberdayaan ekonomi ditingkat desa ada yang berdampak positif dan negatif. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam pemberdayaan seperti pembekalan ekonomi kreatif yang dilakukan ditingkat desa untuk menunjang ekonomi di desa.

Dampak negatif kurang efektifnya transparansi pengelolaan dana desa dikarenakan sebagian masyarakat tidak mampu memberikan kontribusi dengan adanya dana sehingga masyarakat tidak paham realisasi dana desa. Ini diakibatkan tidak ada peran aktif sebagian masyarakat dalam ikut rapat yang dibuat oleh pemerintahan desa. Ini juga berdampak tidak baik dalam ikut sertaan sebagian masyarakat tidak adanya kontrol sosial masyarakat terhadap penggunaan dana desa.

Masyarakat Merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan kebijakan organisasi publik, terutama dalam pelaksanaan pembangunan di desa yang didanai oleh Dana Desa. Masyarakat harus ikut terlibat dalam proses penganggaran sehingga pelaksanaan pembangunan bisa tepat sasaran, efisien dan efektif.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Arzal Syah, Thesis: “*Pengaruh Kompetensi Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Laporan Realisasi Anggaran Dengan Pengendalian Internal Sebagai Intervening*”, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2024).

Selain untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, pemerintah Desa Buntu Awo, Kabupaten Luwu tentu juga harus memperhatikan sistem pengelolaan dana desa yang dijalankan sehingga tidak bertentangan dengan sistem perekonomian yang telah ditetapkan dalam Islam. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan prinsip-prinsip tentang Ekonomi Islam (Qs. Al. Ahzab :72).

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Terjemahnya:

*“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh”.*

Berikut adalah uraian singkat tentang pendapatan desa beserta bidang belanja desa dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat:

No	Uraian	Tahun Anggaran (Dalam Rupiah)		
		2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.167.320.893</b>	<b>1.167.320.893</b>	<b>1.537.089.000</b>
a	Dana Desa	812.619.000	812.619.000	995.930.000
b	Bagi Hasil Pajak	13.086.893	3.086.893	10.000.000
c	Alokasi Dana Desa	341.615.000	341.615.000	531.159.000
d	Pendapatan Lain Lain	781.952	781.952	781.952
<b>2</b>	<b>Belanja</b>	<b>1.187.409.048</b>	<b>1.187.409.048</b>	<b>1.270.502.221</b>
a	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	366.868.655	366.868.655	426.567.370
b	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	166.500.393	166.500.393	502.392.851
c	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	66.300.000	66.300.000	78.600.000
d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	177.340.000	177.340.000	172.942.000

Bidang Penanggulangan			
e Bencana, Darurat Dan	410.400.000	410.400.000	90.000.000
Mendesak Desa			

Sumber data: Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022, 2023 dan Tahun 2024 Desa Buntu Awo, Kabupaten Luwu

Berdasarkan data pada tabel diatas yang diperoleh dari dokumen perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022, 2023 dan Tahun 2024, pada data tersebut kita dapat mengetahui bahwa dana yang digunakan pada bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat tingkat desa masih sangat relatif rendah.

Sedangkan berdasarkan kementerian keuangan prioritas dana desa tidak hanya untuk membiayai pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Pada prinsipnya Dana memberikan banyak maslahat terhadap kehidupan masyarakat desa, misalnya dalam hal kesejahteraan. Dana memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Indonesia. Program ini memberikan akses langsung dan cukup signifikan terhadap sumber daya keuangan bagi desa - desa, yang sebelumnya mungkin mengalami keterbatasan dana untuk pembangunan dan pelayanan dasar.<sup>10</sup>

Inti perubahan yang akan dilakukan antara lain mempertajam esensi pengelolaan keuangan desa dalam sistem penyelenggaraan pemerintah desa yang

---

<sup>10</sup> Mansur, Muhammad Tahmid Nur, Fasiha Fasiha, & M. Ihsan Darwis. "Kebijakan Dana Desa di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara Perspektif Al Maslahah Al Mursalah", *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol 14, No. 2 (2024), hal 125.

menyangkut penjabaran hak dan kewajiban desa dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan serta pertanggungjawaban keuangan desa.

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dengan beberapa masyarakat Desa Buntu Awo bahwa dana Desa yang dikucurkan sejak tahun 2022 belum mencakup seluruh kepala keluarga miskin di Desa Buntu Awo karena bantuan yang dialokasikan melalui dana desa masih kurang dalam membantu atau meningkatkan perekonomian masyarakat miskin di Desa Buntu Awo, kondisi ini terjadi menurut masyarakat dikarenakan proses pemberdayaan terhadap masyarakat hanya pada saat proses pekerjaan itu berlangsung, dan hasil dari pendapatan pekerjaan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai sumber mata pencaharian yang dikarenakan sifatnya hanya sesaat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul **“Strategi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pengelolaan alokasi dana desa di Desa Buntu Awo?
2. Bagaimana strategi pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Buntu Awo?

3. Bagaimana dampak pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Buntu Awo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengeksplorasi apa saja faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buntu Awo?
2. Untuk menganalisis strategi bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Buntu Awo.
3. Untuk menjelaskan dampak pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Buntu Awo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan mampu menambah wawasan untuk peneliti berikutnya tentang seperti apa alokasi dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa. Dapat digunakan sebagai bahan perbandingan ataupun bisa ditingkatkan lebih dalam dan bisa berguna sebagai pedoman atau referensi bagi penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan serta pengajaran langsung mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa serta cara peningkatan ekonomi masyarakat Desa.

- b. Bagi pemerintah, hasil tersebut diharapkan bisa jadi pertimbangan untuk Pemerintah Desa mengenai bagaimana cara pengelolaan Alokasi Dana Desa yang baik, serta masukan tentang bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat. Hasil ini juga dapat berguna sebagai tambahan untuk Pemerintah Desa Buntu Awo agar pengelolaan Alokasi Dana Desa bisa dilaksanakan berdasarkan pada aturan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian ini merupakan salah satu masalah yang baru diteliti, karena terbarunya sehingga peneliti menemukan kajian pustaka yang relevan di perpustakaan IAIN Palopo dan beberapa sumber pencarian online skripsi dan jurnal perpustakaan. Tetapi dari beberapa sumber skripsi dan jurnal yang peneliti dapatkan hanya menyinggung dari apa yang akan peneliti lakukan.

- 1) Justita Dura, dengan penelitiannya yang berjudul "*Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*"<sup>11</sup>. Hasil tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana Desa, kebijakan Desa, dan kelembagaan Desa secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Persamaannya adalah memperoleh hasil bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang paling penting. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian dan jenis penelitian di mana peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian kuantitatif.
- 2) Sofi Koidatul Maqfirah dengan penelitiannya yang berjudul "*Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "PARIKESIT" Desa Wirogomo Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang*".

---

<sup>11</sup> Dura, Justita. "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang." *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia* 10.2 (2021): 26-32.

<sup>12</sup> Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran *stakeholders* yang relevan serta mengkaji faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan BUMDes Parikesit di Desa Wirogomo, Kabupaten Semarang. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur.

- 3) Dwi Sulistiani, dengan penelitiannya yang berjudul “*Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Teluk Tigo Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun*”.<sup>13</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa Teluk Tigo dengan menerapkan indikator pengelolaan dana desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan dana desa berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur untuk pertanian dan perkebunan, namun hingga saat ini belum ada inovasi baru untuk program yang secara langsung berdampak terhadap pembangunan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Teluk Tigo sudah berjalan efektif, walaupun

---

<sup>12</sup> Sofi Koidatul Maqfiroh, Skripsi: “*Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) “Parikesit” Desa Wirogomo Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang*” (Semarang: Undip, 2024)

<sup>13</sup> Sulistiani, D., Prayogo, Y., & Saputra, O. (2025). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Teluk Tigo Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, 9(1).

pengalokasiannya belum sepenuhnya efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

- 4) Mohammad Nasir, dengan penelitiannya yang berjudul "*Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa Melalui Pengembangan Masyarakat Islam Di Kabupaten Pringsewu Lampung*".<sup>14</sup> Hasil penelitian menunjukkan masyarakat mulai merasakan adanya dampak yang positif terlihat dari adanya kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan pembangunan sarana dan prasarana desa seperti pembangunan jalan, jembatan, goronggorong perbaikan fasilitas desa dengan melibatkan masyarakat secara luas dalam setiap tahapannya mulai dari perencanaan pelaksanaan sampai dengan pemeliharaan dan kegiatan pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat Kecamatan Gadingrejo.

Celah penelitian yang telah diidentifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dan optimalisasi BUMDes masih menghadapi berbagai tantangan dalam alokasi dana, kapasitas SDM, inovasi bisnis, dan keterlibatan stakeholder. Potensi dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif, berbasis data, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa dana desa benar-benar dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan ekonomi masyarakat melalui BUMDes. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi pemerintah desa dan stakeholders terkait untuk mengembangkan strategi pengelolaan BUMDes yang lebih inovatif dan

---

<sup>14</sup> Nasir, Mohammad, M. Bahri Ghazali, and Fitri Yanti. "Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa Melalui Pengembangan Masyarakat Islam Di Kabupaten Pringsewu Lampung." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 15, no. 2 (2023): 191-212.

berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Grand Theory**

#### **a. Prinsip Manajemen Keuangan**

Teori besar yang digunakan pada penelitian ini adalah prinsip - prinsip manajemen keuangan menurut Tangkudung dalam Rusdiana dan Wardija yakni sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan, artinya dalam pengelolaan keuangan diperlukan adanya keterbukaan. Keterbukaan tersebut berkaitan dengan keterbukaan sumber-sumber penerima, jumlah dana, serta pertanggungjawaban penggunaan dana.
- 2) Akuntabilitas dalam perspektif manajemen keuangan dapat dipahami sebagai penggunaan dana sekolah yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.
- 3) Efisiensi adalah perbandingan antara usaha dan hasil yang dicapai.
- 4) Efektivitas dapat dipahami sebagai pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Keefektifitasan merupakan kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dokumentasi.

---

<sup>15</sup> DR HA Rusdiana, M. M., H. Wardija, and M. AP. *Manajemen Keuangan Sekolah: Konsep Prinsip dan Aplikasinya di Sekolah/Madrasah*. Arsad Press, 2022.

Teori prinsip manajemen keuangan yang dikemukakan oleh Tangkudung adalah *grand theory* pada penelitian ini. Dasar pengambilan teori ini untuk teori efektivitas adalah fokus pembahasannya yakni mengukur kesesuaian antara hasil yang telah dicapai dengan tujuan yang telah ditentukan.

**b. Teori New Public Management (NPM)**

*Grand theory* dari kapabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa adalah teori New Public Management (NPM)<sup>16</sup>. Teori NPM muncul pada tahun 1980-an sebagai respons atas kegagalan pemerintah dalam memberikan layanan publik yang efisien dan efektif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan melalui administrasi dan tata kelola publik yang berorientasi pada hasil.

Penerapan teori NPM pada pengelolaan alokasi dana desa melibatkan pemberian prioritas pada praktik pengelolaan yang baik, seperti meningkatkan kapabilitas pemerintah desa untuk mengatur, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan yang dibiayai oleh alokasi dana desa. Hal ini meliputi peningkatan kemampuan dalam penganggaran, pengutamaan program dan kegiatan, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

---

<sup>16</sup> Leonard-Barton, D. (1992). Core Capabilities and Core Rigidities: A Paradox in Managing New Product Development. In *Management Journal* (Vol. 13)

## **2. Strategi**

### **a. Pengertian Strategi**

Istilah Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu Strategos yang berarti komandan militer. Konteks awalnya digunakan dalam dunia militer, yaitu membuat rencana dalam menaklukkan musuh. Saat ini berbagai macam definisi strategi dapat ditinjau dari segi politik, ekonomi, perusahaan, dan organisasi. Sedangkan menurut Alfred Chandler merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang suatu perusahaan atau organisasi dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan. Strategi diartikan juga sebagai suatu rencana kegiatan yang menyeluruh yang disusun secara sistematis dan bersifat umum, digunakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, harus dirahasiakan dan tidak semua orang dapat mengetahuinya.<sup>17</sup>

Menurut Fredy Rangkuti dalam bukunya yang berjudul teknik pembedahan kasus bisnis analisis SWOT, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Strategi adalah rencana mengenai bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan akan melakukan apa yang perlu dikerjakan dalam bisnis, bagaimana perusahaan atau organisasi akan menang dalam persaingan, dan bagaimana organisasi atau perusahaan akan menarik perhatian serta memuaskan para pelanggan agar dapat mencapai tujuannya. Kemudian Philip Kotler juga menjelaskan bahwa strategi adalah wujud rencana yang terarah untuk mencapai

---

<sup>17</sup> Farida, Leli. "Analisis Strategi Pengembangan Produk Pangan Lokal Dalam Meningkatkan Industri Kreatif Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur)." PhD diss., UIN Raden Intan Lampung, 2018.

tujuan yang diinginkan. Strategi merupakan serangkaian rancangan besar yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi untuk mencapai tujuannya.<sup>18</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan, strategi dalam lingkup organisasi merupakan sebuah proses perencanaan, penetapan tujuan, serta penentuan sasaran kegiatan dalam jangka waktu yang juga ditentukan untuk mencapai segala sesuatu yang diharapkan oleh organisasi. Strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Misalnya strategi itu mungkin mengarahkan pemerintah desa kearah perbaikan kualitas, dan juga transparansi pengelolaan dana desa. Serta pemerintah desa diharapkan mampu mengoptimalkan ekonomi masyarakat berdasarkan UU Permendagri Desa.

Tujuh aturan dasar dalam merumuskan strategi yang pertama ia harus menjelaskan dan menginterpretasikan masa depan tidak hanya masa sekarang, lalu arahan strategi harus bisa menentukan rencana lalu strategi harus berfokus pada keunggulan kompetitif, tidak semata - mata pada pertimbangan keuangan, kemudian ia harus diaplikasikan dari atas ke bawah, lalu strategi harus mempunyai orientasi eksternal dan juga fleksibilitas adalah sangat esensial lalu strategi harus berpusat pada hasil jangka panjang.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Juwono, Onny. "Analisis Manajemen Strategik Perusahaan Waralaba (Franchise) Studi Kasus di Restoran Cepat Saji McDonald'S." *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen* 1, no. 1 (2012).

<sup>19</sup> Arifudin, Opan. "Manajemen Strategik Teori Dan Implementasi." (2021).

## **b. Langkah-Langkah Penyusunan Strategis**

Penyusunan strategi dapat dilakukan menurut langkah-langkah tertentu:

### 1) Formulasi strategi

Formulasi strategi merupakan dasar awal bagi sebuah organisasi dalam menentukan langkah – langkah ke depannya. Tidak hanya menentukan langkah – langkah organisasi namun juga sebagai upaya pencegahan terhadap masalah yang kemungkinan akan terjadi.<sup>20</sup> Karena formulasi strategi dibuat dengan menganalisis faktor internal dan eksternal perusahaan. Tahapan dalam merumuskan strategi adalah menentukan visi, misi, dan tujuan perusahaan.

Visi merupakan pandangan serta cita – cita mengenai lingkup, skala, dan ukuran yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang.<sup>21</sup> Sedangkan misi merupakan pelaksanaan dari sebuah visi, berupa cara – cara apa saja yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi organisasi.<sup>22</sup> Dan yang terakhir yaitu menentukan tujuan berarti menentukan sasaran akhir yang ingin dicapai melalui berbagai aktivitas operasional.<sup>24</sup>

### 2) Implementasi strategi

Implementasi Strategi merupakan kegiatan pelaksanaan dari sebuah perencanaan, dilakukan secara terorganisir dengan memiliki struktur organisasi serta tersedianya sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Pengarahan, bimbingan, komunikasi merupakan bagian dari

---

<sup>20</sup> Arifudin, Moh, Fathma Zahara Sholeha, and Lilis Fikriya Umami. "Planning (Perencanaan) Dalam Manajemen Pendidikan Islam." *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 02 (2021): 162-183.

<sup>21</sup> Yunus, Eddy. *Manajemen strategis*. Penerbit Andi, 2016.

<sup>22</sup> Calam, Ahmad, and Amnah Qurniati. "Merumuskan visi dan misi lembaga pendidikan." *Jurnal Saindikom* 15, no. 1 (2016).

implementasi strategi dan tentunya dengan koordinasi yang baik.<sup>23</sup> Formulasi strategi dan implementasi strategi saling berkaitan. Formulasi yang baik tanpa proses implementasi yang baik akan berakibat buruk bagi organisasi dan sulitnya mencapai tujuan. Formulasi yang buruk jika diimplementasikan dengan baik tetap saja memiliki hasil yang buruk. Jika formulasi yang baik dan implementasi yang baik pula akan menghasilkan dampak yang positif bagi organisasi. Jadi, proses formulasi strategi dan implementasi strategi saling berkaitan.

### 3) Evaluasi strategi

Evaluasi strategi digunakan untuk mengetahui keberhasilan sebuah strategi. Setelah implementasi dijalankan maka kemudian dipelajari kembali di mana letak keberhasilannya serta di mana letak kesalahannya dari sebuah formulasi strategi. Kemudian evaluasi strategi juga diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan formulasi strategi di periode berikutnya.<sup>24</sup>

## **3. Pengelolaan**

### **a. Pengertian Pengelolaan**

Pengelolaan adalah proses penataan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui fungsi-fungsi manajemen tentu gunanya sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan sebagai bentuk dari pencapaian tujuan bersama yang telah disepakati. Hal ini didukung oleh pendapat Alam yang mengemukakan bahwa pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian

---

<sup>23</sup> Falikha, F. (2022). *Penerapan Fungsi Manajemen Dakwah Pada Ikatan Remaja Masjid Manarul Huda Desa Samirejo* (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).

<sup>24</sup> Nurmiati, N. (2022). *Strategi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Galeso Kecamatan Wonomulyo (Analisis Manajemen Syariah)* (Doctoral dissertation, IAIN PAREPARE).

kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian Suprianto dan Muhsin mengatakan bahwa pengelolaan adalah keterampilan untuk meramu komponen dan unsur-unsur yang terlibat dalam suatu sistem untuk mencapai hasil/tujuan yang direncanakan.<sup>25</sup> Sedangkan menurut Kiyosaki dan Lechter bahwa pengelolaan adalah sebuah kata yang besar sekali yang mencakup pengelolaan uang, waktu, orang, sumber daya, dan terutama pengelolaan informasi.<sup>26</sup>

Menurut Hamidi dan Lutfi Pengelolaan didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang secara pribadi dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasional atau lembaga.<sup>27</sup> Lebih lanjut Hasibuan mengatakan bahwa pengelolaan adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber - sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>28</sup> Sudirman memandang bahwa manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota.<sup>29</sup> Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan.<sup>30</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan,

---

<sup>25</sup> Naway, F. A. (2016). Strategi pengelolaan pembelajaran. *Gorontalo: Ideas Publishing*.

<sup>26</sup> Hermanto, W., & As'ari, H. (2023). Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 317-328.

<sup>27</sup> Nurmiati, N. (2022). *Strategi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Galeso Kecamatan Wonomulyo (Analisis Manajemen Syariah)* (Doctoral dissertation, IAIN PAREPARE).

<sup>28</sup> Rahayu, K. W. (2017). Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada sekretariat daerah Kabupaten Kutai Timur. *Ekonomia*, 6(1), 177-182.

<sup>29</sup> Tharob, H. (2022). *Manajemen Keuangan Himpunan Mahasiswa Prodi IAIN Ambon Perspektif Keuangan Syari'ah* (Doctoral dissertation, IAIN AMBON).

<sup>30</sup> Sarnoto, A. Z. (2013). Urgensi Peningkatan Mutu Pengelolaan Pesantren Dalam Era Global. *Educare*, 3(3), 49-60.

mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dikatakan pengelolaan adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif. Menurut Fattah berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi - fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pemimpin (*leading*), dan pengawasan (*controlling*).<sup>31</sup>

#### **b. Fungsi-Fungsi Pengelolaan**

Banyak sekali fungsi manajemen, tapi dapat ditarik kesimpulan dari pendapat para ahli ada empat fungsi yang sama yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Adapun penjelasan dari fungsi- fungsi tersebut adalah:

##### 1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan pemilihan dan penghubungan fakta, menguatkan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif - alternatif kepuasan. Diperlukan kemampuan untuk

---

<sup>31</sup> Putra, Y. K. (2022). *Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sungai Radak Satu Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya* (Doctoral Dissertation, Universitas Tanjungpura).

mengadakan visualitas dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.<sup>32</sup>

a) Unsur-Unsur Suatu Rencana

Pada umumnya suatu rencana yang baik berisikan atau memuat enam unsur yaitu *what, way, where, when, who dan how*. Jadi sesuatu rencana yang baik harus memeberikan jawaban kepada enam pertanyaan sebagai berikut:

- (1) Tindakan apa yang harus dikerjakan?
- (2) Apakah sebabnya tindakan itu harus dikerjakan?
- (3) Dimakah tindakan itu harus dilaksanakan?
- (4) Kapankah tindakan itu dilaksanakan?
- (5) Siapakah yang akan megerjakan tindakan itu?
- (6) Bagaimanakah caranya malaksanakan tindakan itu?

b) Sifat Suatu Rencana yang Baik

Sesuatu rencana yang baik, haruslah mengandung sifat-sifat sebagai berikut:

- (1) Pemakaian kata-kata yang sederhana dan terang untuk menghindari penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda sehingga mudah diketahui maksudnya oleh setiap orang.
- (2) Fleksibel, yaitu rencana tersebut harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah yang tidak diduga sebelumnya, apabila terjadi perubahan maka tidak perlu dirubah seluruhnya.

---

<sup>32</sup> Amelia, I. (2018). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sijungkang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 1(1), 42-53.

- (3) Mempunyai stabilitas, yang berarti suatu rencana tidak perlu setiap kali diubah atau tidak dipakai sama sekali. Meliputi semua tindakan yang diperlukan, yaitu rencana tersebut meliputi segala - galanya, sehingga dengan demikian terjamin kordinasi dari tindakan - tindakan seluruh unsur - unsur organisasi.

c) Proses Pembuatan suatu Rencana

Untuk membuat suatu rencana ada beberapa tindakan yang harus dilalui. Tingkatan - tingkatan atau langkah - langkah tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Menetapkan tugas dan tujuan
- (2) Mengobservasi dan menganalisa
- (3) Mengadakan kemungkinan – kemungkinan
- (4) Membuat sintesa
- (5) Menyusun rencana

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat - alat, tugas - tugas tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.<sup>33</sup>

3) Pengerakan (*Actuating*)

Pengerakan atau juga biasa didefinisikan sebagai segala tindakan untuk menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi, agar dengan kemauan dengan

---

<sup>33</sup> Wowor, M., Singkoh, F., & Waworundeng, W. (2019). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompasso. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).

penuh berusaha mencapai tujuan organisasi dengan berlandaskan pada perencanaan dan pengorganisasian. Penggerakan mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada mereka. *Actuating* atau juga disebut” gerakan aksi “mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.<sup>34</sup>

#### 4) Pengawasan (*Controlling*)

Desa kini memiliki peluang yang sangat baik untuk mengawasi dan melaksanakan pengembangan yang membangun taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya berkat disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, para pemimpin desa perlu lebih banyak otonomi dalam mengawasi sumber daya alam desa, terutama kekayaan dan ekonominya. Desa memiliki banyak tugas dan kewajiban, dan kepala desa harus menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, yang meminta kepala desa untuk mempertanggungjawabkan kepada rakyat atas semua tindakan administratif yang dilakukan sesuai dengan aturan dan hukum (Pakpahan & Lestari).<sup>35</sup> Pengawasan merupakan pemeriksaan apakah semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, intruksi yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan (Henry Fayol).<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Amir, A., Noerjoedianto, D., & Herwansyah, H. (2019). Studi Kualitatif Tentang Peran Kepala Puskesmas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Kesmas Jambi*, 3(1), 55-61.

<sup>35</sup> Zullian, M. R., Poti, J., & Okparizan, O. (2024). *Kapabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga* (Doctoral Dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).

<sup>36</sup> Mahulae, D. Y. D. (2022). *Pengantar Manajemen*. PT Inovasi Pratama Internasional.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang ada di desa merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD dibentuk, pengawasan yang dilakukan BPD adalah pengawasan preventif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan, yang diawasi lebih kepada penggunaan APBDes, Swadaya Masyarakat, dan Dana Desa. Mekanisme pengawasan Dana Desa oleh BPD dimulai dari proses musyawarah bersama bersama masyarakat/musyawarah desa, tahap pembuatan Rencana Anggaran Belanja (RAB), tahap proses pelaksanaan pembangunan, dan sampai pada tahap penyampaian laporan/laporan pertanggungjawaban oleh Kepala Desa. Adapun Macam-macam pengawasan sebagai berikut:

a) Pengawasan dari dalam organisasi (*Internal Control*)

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang - kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan - keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan - tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya internal control.

b) Pengawasan dari luar organisasi (*external control*)

Pengawasan eksternal (*external control*) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Terhadap suatu departemen, aparat pengawasan ini bertindak atas nama pemerintah/presiden melalui menteri keuangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ialah pemeriksaan/pengawasan yang bertindak atas nama negara Republik Indonesia.

c) Pengawasan preventif

Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit.

d) Pengawasan Represif

Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit.

### c. Prinsip-Prinsip Manajemen

Prinsip dalam manajemen bersifat lentur, dalam arti perlu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi - kondisi khusus serta situasi - situasi yang berubah. Menurut Henry Fayol pencetus teori manajemen yang berasal dari Perancis, prinsip-prinsip umum manajemen terdiri atas:<sup>37</sup>

- 1) Pembagian kerja (*division of work*)
- 2) Wewenang dan tanggung jawab (*authority and responsibility*)
- 3) Disiplin (*discipline*)
- 4) Kesatuan perintah (*unity of command*)
- 5) Kesatuan pengarahan (*unity of direction*)
- 6) Mengutamakan kepentingan organisasi
- 7) Penggajian pegawai
- 8) Pemusatan (*centralization*)
- 9) Hierarki (*tingkatan*)
- 10) Ketertiban (*order*)
- 11) Keadilan dan kejujuran
- 12) Stabilitas kondisi karyawan
- 13) Prakarsa (*inisiative*)
- 14) Semangat kesatuan.

Douglas merumuskan prinsip-prinsip manajemen sebagai berikut:<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Ambarwati, S. W. (2020). *Manajemen Program Dana Bergulir Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Masjid Agung Kota Kediri)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

<sup>38</sup> Faruqi, D., & Hakim, L. (2022). Prinsip Manajemen Perspektif Pendidikan Islam. *Roqooba Journal of Islamic Education Management*, 2(1), 34-41.

- 1) Memprioritaskan kepentingan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja
- 2) Mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab
- 3) Memberikan tanggungjawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya
- 4) Mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia
- 5) Relatifitas nilai-nilai.

#### **4. Dana Desa**

##### **a. Pengertian Dana Desa**

Secara bahasa Dana Desa terdapat dua kata yaitu Dana dan Desa. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan.<sup>39</sup> Sedangkan desa secara etimologi berasal dari kata *swadesi* (bahasa sansekerta) yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Desa dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>40</sup> Aceh memiliki keistimewaan dalam penyebutan Gampong, Sesuai dengan Qanun No 5 Tahun 2003 penyebutan nama desa khusus untuk Aceh disebut Gampong. Gampong memiliki pengertian yang sama dengan desa.

---

<sup>39</sup> Lisa, N. (2024). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Empiris Di Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

<sup>40</sup> Astuti, H. K. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Pertenakan Sapi Perah (Studi Kasus Desa Pudak Kulon, Kec. Pudak, Kab Ponorogo)*.

Menurut UU No. 23 tahun 2014 pasal 294 ayat 3, Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Pusat Untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa.<sup>41</sup>

Menurut Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi No. 21 tahun 2015, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Setiap tahun Desa akan mendapatkan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya dilakukan melalui kabupaten/kota. Dana Desa merupakan mandat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dialokasikan dalam bentuk transfer, bukan berbentuk proyek. Selama UU Desa berlaku maka DD akan terus menerus dialokasikan oleh Pemerintah. Dana Desa bersumber dari Belanja Negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang wajib dialokasikan setiap tahun sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-

---

<sup>41</sup> Arina, A. I. S., Masinambow, V., & Walewangko, E. N. (2021). Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(3).

Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Besaran Dana Desa (DD) adalah 10 persen (10%) dari dan di luar dana.<sup>42</sup>

Transfer Daerah (atau *on top*) yang dialokasikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara bertahap. Contoh, apabila belanja Transfer Daerah di dalam APBN tahun 2017 adalah Rp. 810 triliun, maka besaran Dana Desa yang harus disediakan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 201

Dana Desa berbeda dengan Alokasi Dana Desa, Dana Desa (DD) merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk Desa yang diambilkan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan.

#### **b. Mekanisme Penyaluran Dana Desa**

Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bersifat delegatif dan koordinatif. Pemerintah pusat mengatur, menetapkan, dan menyalurkan Dana Desa melalui RKUD. Dalam hal ini daerah Kabupaten/Kota tidak menyalurkan Dana

---

<sup>42</sup> Bawono, I. R. (2019). *Panduan penggunaan dan pengelolaan dana desa*. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Desa kepada Desa, maka pemerintah pusat juga berwenang memberikan sanksi pemotongan Dana Perimbangan tahun berikutnya.<sup>43</sup>

- 1) Pemerintah menetapkan pagu Dana Desa di dalam jenis Belanja Transfer ke Daerah dan Desa, pada kelompok Belanja Negara dalam UU tentang APBN atau UU tentang Perubahan APBN setiap tahun. Pemerintah menghitung dan menetapkan pagu Dana Desa untuk setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasil perhitungan dan pembagian tersebut dijadikan lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden tentang Penjabaran APBN. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dana Transfer Desa dana transfer adalah dana yang bersumber dari Dana Desa, Dana Bagi Hasil, Pajak dan Retribusi Daerah, DD, dan Bantuan Keuangan yang ditransfer ke rekening Pemerintah Desa. Selanjutnya dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dana Transfer Desa, dikemukakan bahwa tujuan pembagian dana transfer untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sehingga melalui DD, desa berpeluang meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dana transfer haruslah dikelola dengan tahapan yang sesuai Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan,

---

<sup>43</sup> Abdullah, D. (2016). Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 83-103.

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk melaksanakan ketentuan pasal tersebut, dalam Bab V Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- 2) Perencanaan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk APBDesa berdasarkan RPJM Desa dan RK Desa tahun berkenaan disusun oleh Sekretaris Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa yang kemudian dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk sepakati bersama dalam musyawarah yang melibatkan masyarakat paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
- 3) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanahn melalui rekening desa yang harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Serta pelaksanaan kegiatan dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang mengharuskan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran.
- 4) Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, dengan kewajiban mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa.
- 5) Pelaporan pelaksanaan APBDesa di sampaikan Kepala Desa kepada Bupati berupa laporan semester pertama paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan melampirkan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, format Laporan Kekayaan Milik Desa, dan format Laporan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa yang harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi.<sup>47</sup> Pemerintah kemudian menyalurkan Dana Desa secara bertahap, setelah menteri menerima dokumen-dokumen sebagai berikut :

- 1) Perda tentang APBD Kabupaten/Kota
- 2) Peraturan Bupati/ Walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa
- 3) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Sesuai dengan perintah UU N0. 6/2014 tentang Desa. Dana Desa disalurkan (ditransfer) ke rekening daerah dan tidak langsung ke rekening kas desa. Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota dengan cara pemindah-bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Selanjutnya Dana Desa disalurkan oleh Kabupaten/Kota kepada Desa dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke rekening kas Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.

### **c. Prioritas Pembangunan Dana Desa**

Menurut Peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi No. 21 tahun 2015 pengaturan prioritas penggunaan dana desa bertujuan untuk:

- 1) Menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh dana desa;
- 2) Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis Penggunaan Dana Desa; dan
- 3) Acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- 1) Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan; (Inklusif)
- 2) Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
- 3) Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

#### **d. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat**

Meningkatan perekonomian masyarakat yang dimaksud peneliti adalah cara atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengatur pendapatan rumah tangga masyarakat miskin untuk menjadi lebih baik dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Ekonomi menurut Samuelson dan Nordhaus merupakan studi

mengenai bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya yang langka untuk menghasilkan barang yang bernilai, kemudian mendistribusikannya terhadap kelompok masyarakat lainnya.<sup>44</sup>

Menurut Hassan Shadily Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. Sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan adalah Orang-orang yang hidup bersama di mana menghasilkan atau membentuk sebuah kebudayaan. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang berkumpul dan hidup dalam sebuah lingkungan dan saling berinteraksi satu sama lain.<sup>45</sup>

Ekonomi masyarakat adalah sebagian kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan masyarakat kebanyakan yang dengan cara swadaya. Pengelolaan sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan, yang selanjutnya di sebut usaha kecil dan menengah. Yang bertujuan untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta mencapai kemudahan dan kepuasan. Adapun indikator perekonomian masyarakat yakni sebagai berikut:<sup>46</sup>

- 1) Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas

---

<sup>44</sup> Ramlawati, S. E., et al. *Pengantar Ekonomi*. Cendikia Mulia Mandiri, 2022.

<sup>45</sup> Prihatini, Y. Y. (2020). Dampak Pembangunan Terhadap Perubahan Mata Pencaharian Masyarakat Pesisir Dan Sekitar Kecamatan Pulomerak.

<sup>46</sup> Dewi, A. P., & Devi, Y. (2022). Upaya Bumdes Dalam Pengembangan Objek Pariwisata Green Bamboo Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Sri Bandung Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara). *Salam (Islamic Economics Journal)*, 3(2), 174-195.

dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Arus pendapatan tersebut muncul sebagai akibat dari adanya jasa produktif (*productive service*) yang mengalir kearah yang berlawanan dengan aliran pendapatan yaitu jasa produktif yang mengalir dari masyarakat kepihak bisnis yang berarti bahwa pendapatan harus didapat dari aktivitas produktif.

- 2) Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Kebutuhan merupakan keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun kebutuhan rohani. Kebutuhan manusia tidak terbatas pada kebutuhan yang bersifat konkret (nyata) tetapi juga bersifat abstrak (tidak nyata).

Peningkatan Ekonomi Masyarakat berarti upaya membangkitkan kemampuan, memberikan kebebasan, serta kesempatan kepada masyarakat yang berada dalam kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta berupaya untuk berada dalam kondisi yang lebih baik dari sebelumnya.

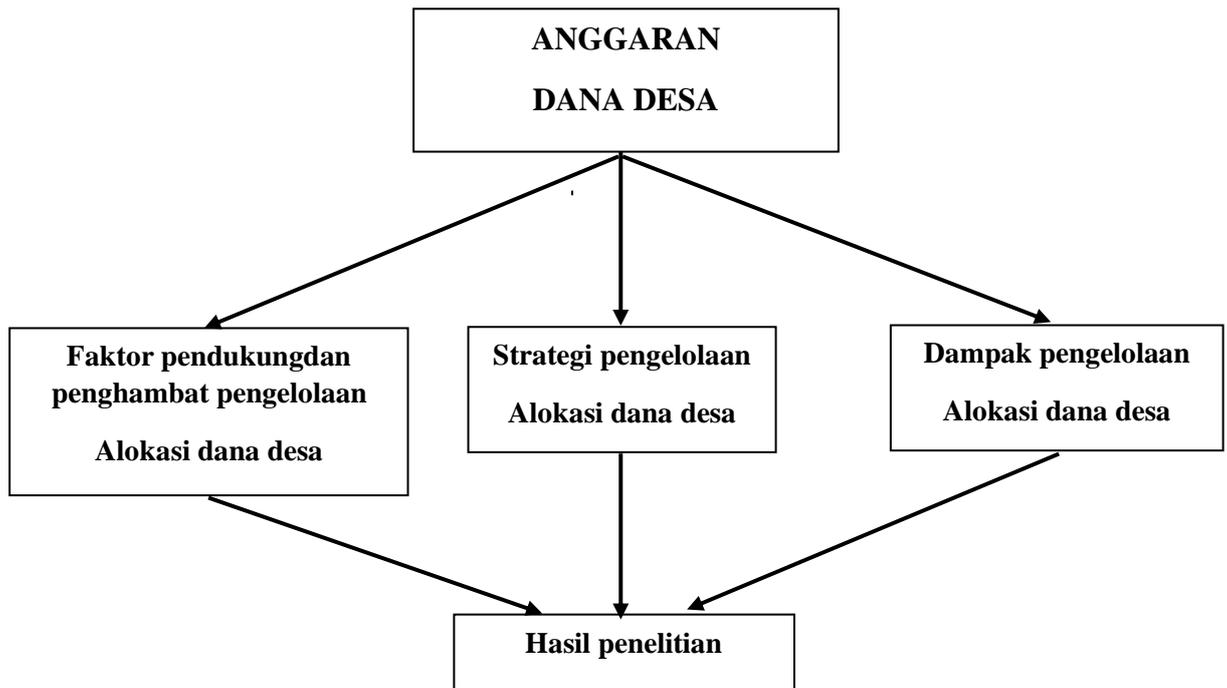
### **C. Kerangka Pikir**

Menurut Sugiyono, kerangka pikir merupakan alur berpikir atau alur penelitian yang dijadikan pola atau landasan berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju.<sup>47</sup> Jadi kerangka berpikir merupakan alur yang dijadikan pola berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap suatu objek yang dapat menyelesaikan arah rumusan masalah dan tujuan penelitian.

---

<sup>47</sup> Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Berdasarkan pandangan diatas, maka alur pelaksanaan penelitian ini dapat disajikan dengan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Perspektif yang dipakai didalam memahami fenomena pada objek, digunakan beberapa pendekatan. Pendekatan yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Pendekatan sosiologis, yaitu usaha untuk melihat hubungan kerjasama pemerintah Desa Buntu Awo dengan masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari di Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu.
- b. Pendekatan komunikasi, suatu aktivitas masyarakat dalam melakukan komunikasi baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mendapatkan data yang akurat.

##### **2. Jenis penelitian**

Jenis yang dipakai merupakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil dalam penelitian ini nantinya hasil wawancara antara peneliti dan informan.<sup>48</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Kabupaten Luwu merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai wilayah yang cukup luas. Kabupaten Luwu dibatasi oleh Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo di sebelah utara. Kabupaten Luwu memiliki beberapa desa salah satunya adalah Desa Buntu Awo yang berada di Kecamatan Walenrang

---

<sup>48</sup> Rukin, S. Pd. *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.

Utara. Luas wilayah Desa Buntu Awo sekitar  $\pm 98.000 \text{ Km}^2$ , yang terdiri dari 4 dusun. Penelitian ini dilakukan di Desa Buntu Awo yang beralamat di jl. Trans Palopo-Masamba, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu.

Penduduk Desa Buntu Awo yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, kemudian buruh tani, dan tukang bangunan yang mempunyai penghasilan rata-rata antara Rp.500.000 s/d 1.000.000 per bulan. Desa Buntu Awo yang sebaran jumlah penduduknya tergolong padat. Pada tahun 2024 jumlah penduduk yang tercatat adalah mencapai 1.593 jiwa yang terdiri dari 788 jiwa adalah laki-laki dan 805 jiwa adalah perempuan. Dengan penghasilan rata-rata dan jumlah penduduk yang tergolong padat, maka masyarakat Desa Buntu Awo tergolong masyarakat dengan penghasilan rendah.

Visi adalah gambaran masa depan yang merupakan suatu keinginan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan. Adapun visi Desa Buntu Awo yaitu “Mewujudkan Desa Buntu Awo Menjadi Desa Bersinar Menuju Terciptanya Masyarakat Mandiri, Sehat dan Sejahtera Berlandaskan Toleransi beragama dan Budaya.”

### **C. Fokus Penelitian**

Bertujuan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Pembatasan penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi. Akan difokuskan pada “Strategi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat” yang objek utamanya adalah pemberdayaan masyarakat melalui ADD yang ada di Desa

Buntu Awo, Kec. Walenrang Utara, Kab. Luwu.

#### **D. Defenisi Istilah**

Berikut definisi istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Strategi merupakan kombinasi dari hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dan dibatasi oleh waktu dan sumber daya.
2. Alokasi dana Desa merupakan bagian keuangan yang dananya berasal dari hasil pajak daerah serta dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten kota lalu dibagikan kepada setiap desa berdasarkan porsi masing-masing desa.
3. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pengembangan kemandirian masyarakat yang dimana dapat terlaksana jika masyarakat ikut terlibat untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat itu sendiri agar masyarakat dapat sejahtera.

#### **E. Data dan Sumber Data**

1. Data yang digunakan dalam penelitian berupa data kualitatif, yang merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.
2. Sumber data merupakan asal darimana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini terdapat sumber data primer yaitu sumber data primer merupakan data yang diambil langsung oleh peneliti dengan cara menggali

sumber asli dari responden.<sup>49</sup> Data diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. data yang dikumpulkan disini merupakan data-data yang berhubungan dengan objek yang ingin diteliti untuk tujuan memudahkan peneliti untuk mengetahui adakah unsur-unsur yang dijalankan tidak sesuai sebagaimana mestinya. Pengelolaan datanya berupa pengumpulan data-data yang dihasilkan dari hasil wawancara langsung dengan informan yaitu kepala desa, serta masyarakat di Desa Buntu Awo.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan bagian yang menjelaskan alat atau media yang digunakan dalam mengumpulkan data agar penelitian mudah dan memiliki hasil yang lebih baik.<sup>50</sup> Pada penelitian ini adalah pedoman wawancara guna untuk memperoleh data dari kepala Desa Buntu Awo, staf desa dan masyarakat melalui beberapa pertanyaan. Selain itu, instrumen yang digunakan yakni alat dokumentasi.

Berikut nama-nama yang menjadi informan dalam penelitian tersebut:

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Raswil	Kepala desa	Informan Kunci
2.	Arsul	Sekretaris Desa	Informan Kunci
3	Yammar	Bendahara Desa	Informan Kunci
4	Sinta, SE	Pendamping Desa	Informan Pendukung
5	Irwan joggo	Kasi Sejahtera	Informan Pendukung

<sup>49</sup>Febriani, Elsa Selvia, et al. "Analisis data dalam penelitian tindakan kelas." *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* 1.2 (2023): 140-153.

6	Zainal	Kepala Bpdesa	Informan Pendukung
7	Haerul	Tokoh Masyarakat	Informan Pendukung
8	Puger	Masyarakat	Informan Pendukung
9	Nyong	Masyarakat	Informan Pendukung
10	Uni	Masyarakat	Informan Pendukung
11	Hamsul	Masyarakat	Informan Pendukung
12	Ahmad Zainuri	Masyarakat	Informan Pendukung
13	Rahman	Masyarakat	Informan Pendukung
14	Selfi	Masyarakat	Informan Pendukung
15	Rosdiana	Masyarakat	Informan Pendukung

**Gambar 2.2 Tabel Informan Penelitian**

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Teknik Observasi**

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai pelatihan yang fokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu<sup>51</sup>. Dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dengan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Penelitian ini menggunakan observasi partisipan. Dimana dalam penelitian ini peneliti datang di tempat kegiatan dan mengamati kegiatan di Desa Buntu Awo.

<sup>51</sup>Aziz, Antartila Rizki. "Evaluasi Kinerja Pegawai dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Cacat Tuna Netra pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Rehabilitas Penyandang Cacat Netra Provinsi Sumatera Selatan." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)* 1.1 (2018): 11-23.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mendapat informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada informan<sup>52</sup>. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam, yaitu tatap muka dan pertemuan secara langsung. Kegiatan ini dilakukan untuk menggali data dan memperoleh data tentang Strategi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu.

## 3. Study Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, karya-karya monumental dari seseorang, dan tulisan. Pada saat observasi dan wawancara telah selesai dilaksanakan oleh peneliti.<sup>53</sup>Peneliti melapor kepada narasumber atau orang yang di wawancara untuk mengambil gambar berupa foto dan rekaman audio untuk memperkuat informasi dan sebagai bukti bahwa peneliti betul-betul melaksanakan observasi dan wawancara di Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu.

## H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan penulis yaitu teknik triangulasi. Dimana triangulasi merupakan teknik pemeriksaan untuk keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar untuk keperluan pengecekan atau sebagai

---

<sup>52</sup>Fadilla, Annisa Rizky, and Putri Ayu Wulandari. "Literature review analisis data kualitatif: tahap pengumpulan data." *Mitita Jurnal Penelitian* 1.3 (2023): 34-46.

<sup>53</sup>Nilamsari, Natalina. "Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif." *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13.2 (2014): 177-181.

perbandingan terhadap data itu.<sup>54</sup>

## 1. Triangulasi.

### a. Triangulasi Sumber Data

- 1) Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh dengan membandingkan informasi dari berbagai informan. penulis mewawancarai Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan ibu-ibu rumah tangga yang terlibat dalam program pemberdayaan ekonomi untuk mendapatkan perspektif yang berbeda mengenai pengelolaan dana desa.
- 2) Jika terdapat perbedaan dalam informasi yang disampaikan oleh masing-masing informan, penulis akan menelusuri lebih lanjut untuk mengidentifikasi sumber perbedaan tersebut. Misalnya, jika Kepala Desa menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan berjalan lancar, namun ibu-ibu rumah tangga menyatakan kesulitan dalam penerapan program, penulis akan melakukan konfirmasi untuk menggali alasan perbedaan tersebut.
- 3) Penulis juga membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber (seperti dokumen resmi desa, laporan pertanggungjawaban, dan wawancara dengan perangkat desa dan masyarakat) untuk mengecek konsistensi data.

---

<sup>54</sup> Ziliwu, Syukur Hati, Rohpinus Sarumaha, and Darmawan Harefa. "Analisis kemampuan koneksi matematika pada materi transformasi siswa kelas xi smk negeri 1 lahusa tahun pembelajaran 2020/2021." *Afore: Jurnal Pendidikan Matematika* 1.1 (2022): 15-25.

- b. Triangulasi Metode
- 1) Penulis juga menggunakan triangulasi metode untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sah dan dapat dipertanggungjawabkan. selain wawancara, penulis menggunakan observasi lapangan dan analisis dokumen terkait pengelolaan dana desa.
  - 2) Wawancara dengan aparat desa dilakukan untuk mendapatkan data kualitatif mengenai pengelolaan dana desa, sedangkan observasi lapangan dilakukan untuk melihat langsung implementasi dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan dengan dana desa, seperti perbaikan infrastruktur atau kegiatan pemberdayaan masyarakat.
  - 3) Penulis juga memeriksa dokumen-dokumen terkait, seperti laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa, APBDes, dan laporan musrenbang untuk melihat apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana yang telah disepakati.
  - 4) Setelah memperoleh data dari berbagai metode ini, penulis akan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen yang ada. Jika terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian antara satu metode dengan metode lainnya, penulis akan melakukan klarifikasi dan pengecekan lebih lanjut untuk menemukan perbedaan tersebut dan memastikan keabsahan data.

#### **I. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Berikut adalah aktifitas yang dilakukan pada saat analisis data:<sup>55</sup>

### 1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data ini, dalam proses penelitiannya akan menghasilkan ringkasan catatan dari lapangan. Proses reduksi data ini akan dapat memperpendek, mempertegas, membuat focus, dan membuang hal yang tidak perlu.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data disini dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan suatu tindakan. Maka dari itu semua data yang ada dilapangan dianalisis sehingga memunculkan deskripsi tentang Strategi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dapat dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Proses penarikan kesimpulan didasarkan pada gabungan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk padu pada penyajian data. Melalui informasi

---

<sup>55</sup> Pelealu, Angelina, Grace B. Nangoi, and Natalia YT Gerungai. "Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung." *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 13.04 (2018).

tersebut, peneliti dapat melihat apa yang ditelitinya dan menemukan kesimpulan yang benar mengenai obyek penelitian. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Sebelum melakukan pembahasan penelitian, penelitian mencoba menjabarkan data hasil wawancara dan observasi dengan teks naratif, agar lebih mudah dipahami dan dikaitkan dengan teori yang dijadikan landasan berpikir.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Febriani, Elsa Selvia, et al. "Analisis data dalam penelitian tindakan kelas." *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* 1.2 (2023): 140-153.

## BAB IV

### DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Data

##### 1. Kondisi Ekonomi Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat, dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak.<sup>57</sup> Berikut beberapa indikator kesejahteraan masyarakat di Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu.

###### a. Tingkat pendidikan masyarakat

Pendidikan adalah suatu bimbingan untuk mengembangkan potensi anak untuk mencapai kedewasaan dengan tujuan agar anak tersebut cukup cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya dan tidak bergantung kepada orang lain. Pendidikan dapat diperoleh melalui lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal.<sup>58</sup> Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk kemajuan bangsa, sebab maju mundurnya suatu bangsa dapat diukur dari segi pendidikan suatu bangsa itu sendiri terutama bagi generasi muda, sebab itu pemerintah selalluberusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan.

---

<sup>57</sup> Daud, Muhammad, and Yushita Marini. "Implementasi program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin." *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum* 2.1 (2018): 29-38.

<sup>58</sup> Ikhsan, Muhammad, Achmad Asrori, and N. H. Murtafiah. "Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik Di Sma Jam'iyah Islam'iyah Kabupaten Ogan Ilir." *Unisan Jurnal* 2.1 (2023).

Hal ini selaras dengan tujuan peningkatan pengetahuan dalam memacu tingkat kemajuan serta proses pembaharuan menurut terciptanya masyarakat yang cerdas dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat manusia. Keadaan pendidikan di Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu sudah nampak mulai berkembang. Untuk mengetahui keadaan pendidikan masyarakat Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	Taman Kanak Kanak	41
2	Tamat SD	28
3	Tamat SMP/Sederajat	25
4	Tamat SMA/Sederajat	49
5	Sarjana (D III, S 1, S 2)	95
6	Tidak Lulus dan Tidak Sekolah	12
Jumlah		250

Sumber: Kantor Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara

Adapun sarana dan prasarana pendidikan dan tempat ibadah yang ada di Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

No	Sarana Masyarakat	Jumlah (Unit)
1	TK	1
2	SD	1
3	SMP	1
4	Masjid / Mushollah	3

Sumber: Kantor Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa lembaga pendidikan di Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara hanya lembaga pendidikan dasar,

itu pun tidak ada lembaga pendidikan menengah pertama yang paling tinggi ada di desa. Hal ini dikatakan belum memadai untuk menunjang pendidikan anak (remaja), karena tidak adanya pendidikan tingkat lanjutan.

b. Tingkat Kesehatan Masyarakat

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk membandingkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia antara negara adalah *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks tersebut merupakan indikator komposit yang terdiri dari: indikator kesehatan (umur harapan hidup lahir), pendidikan (angka melek huruf dan sekolah) secara ekonomi (pengeluaran riil perkapita).<sup>59</sup> Indikator kesehatan yang menjadi komponen sejahtera meliputi:

- 1) Pangan, dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum perkiraan kalori dan protein yaitu 2100 kkal/hari.
- 2) Sandang, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan pakaian, alas kaki dan tutup kepala.
- 3) Kesehatan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk menyediakan obat-obatan dirumah, ongkos dokter dan perawatan.

Untuk indikator kesehatan, indikator yang mewakili dalam IPM adalah umur harapan hidup lahir. Namun bila ditanya lebih lanjut, bagaimana cara meningkatkan

---

<sup>59</sup> United Nations Development Programme (UNDP). (1990). Human Development Report. New York: Oxford University Press

umur hidup, sulit dijawab dengan pasti. Oleh karena tampaknya diperlukan serangkaian indikator kesehatan lain yang diperkirakan berdampak pada kesehatan yang pada gilirannya meningkatkan umur hidup waktu lahir.

Hal ini ditegaskan dengan adanya fasilitas kesehatan berupa 1 (satu) unit puskesmas, 1 (satu) unit posyandu dan 1 (satu) unit poskesdes bahwa tidak adanya penurunan kesehatan yang di akibatkan kekurangan gizi atau kematian bayi dan ibu hamil, hal ini disebabkan karena hampir seluruh masyarakat dalam pemenuhan gizi yang sudah tercukupi selain itu masyarakat dalam penanganan bayi sudah tidak menggunakan tabib atau dukun bayi ini dikarenakan akses jalan menuju puskesmas semakin mudah. Dan kemajuan zaman yang mudah mengakses internet maka masyarakat dapat mudah mengakses informasi-informasi mengenai kesehatan.

c. Tingkat Pendapatan Masyarakat

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota - anggota rumah tangga<sup>60</sup>. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi kebutuhan jasmani, kesehatan, maupun, pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Sebagian besar penduduk Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara bermata pencaharian sebagai buruh dan petani, sebagian lainnya bekerja sebagai pengrajin, berdagang, anggota TNI/Polri dan sebagian terkecil sebagai pegawai negeri, honorer dan pegawai swasta, serta peternak.

---

<sup>60</sup> Kapisa, Mateus Benyamin, Siti Aisah Bauw, and Rumas Alma Yap. "Analisis tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan terhadap pendapatan kepala keluarga (KK) di Kampung Manbesak Distrik Biak Utara Provinsi Papua." *Lensa Ekonomi* 15.01 (2021): 131-150.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara bapak Irwan Joggo, beliau menyampaikan bahwa :<sup>61</sup>

“Masyarakat desa sini sebagian besar bekerja sebagai buruh tani dan petani, karena tanah disini banyak dalam bentuk lahan sawah sehingga kebanyakan penduduk disini bekerja sebagai petani dan buruh tani. Namun tidak hanya itu, penduduk Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara juga ada yang bekerja sebagai pedagang, PNS, serta TNI/Polri”.

Hasil wawancara dengan bapak Khaerul selaku tokoh masyarakat Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara mengatakan bahwa :

“Masyarakat disini kebanyakan menjadi buruh dek, kalau gak buruh tani ya buruh bangunan. Pemudanya juga banyak yang belum bekerja, bahkan banyak yang mencari pekerjaan ke luar desa”.

Adapun besarnya pendapatan masyarakat Desa Buntu Awo Kecamatan

Walenrang Utara menurut profesi pekerjaannya sebagai berikut:

Tabel Pendapatan Rata – Rata Penduduk Tahun 2024

No	Jenis Profesi	Pendapatan yang diperoleh/ bulan
1	Petani	Rp 1.000.000 – 1.500.000
2	Buruh Tani	Rp 500.000
3	Buruh Bangunan	Rp 1.000.000
4	Pedagang	Rp 900.000
5	Pengrajin	Rp 1.200.000
6	Pegawai Swasta	Rp 2.000.000

Sumber: Kantor Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan pendapatan masyarakat mengalami perubahan, ini menunjukan bahwa pengelolaan dana desa memberikan manfaat pada peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara.

<sup>61</sup>Hasil wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara bapak Irwan Joggo. Senin 9 desember 2024, pukul 08:30 WITA .

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Selfi, selaku masyarakat Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara yang berprofesi sebagai pedagang, beliau menyampaikan bahwa:<sup>62</sup>

“Setelah adanya Dana Desa, jalan diperbaiki, terus adanya penerang jalan yang memadai sehingga memiliki pengaruh terhadap omset penjualan saya. Kan kami sebagai pedagang di pasar biasa berangkat kepasar pada jam 04.00, dimana sebelum adanya penerang jalan kami kadang merasa was-was”.

Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Puger dan Bapak Nyong, masyarakat Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara yang berprofesi sebagai petani dan buruh bangunan.<sup>63</sup>

“Pembangunan sarana dan prasarana benar-benar di optimalkan, sehingga saat musim kemarau tidak bingung lagi untuk mengairi sawah, jadi mengurangi kemungkinan gagal panen. Begitu pun saat musim hujan, sawah kami sudah jarang mengalami banjir.”

“Sejak adanya desa Desa kami yang berprofesi sebagai buruh bangunan merasa terbantu. Karena pembangunan yang di selenggarakan desa melibatkan masyarakat setempat dan masyarakat banyak yang ikut andil. Sehingga kami memiliki penghasilan tambahan.”

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Hasil Penelitian**

#### **a. Faktor pendukung dan penghambat pengeolaan alokasi dana desa di Buntu awo**

Pelaksanaan pengelolaan dana desa berbagai faktor yang mempengaruhi baik yang sifatnya mendukung maupun faktor yang menjadi penghambat proses pengelolaan dana desa. Adapun faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa

---

<sup>62</sup>Hasil wawancara dengan ibu Selfi, selaku masyarakat Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang utara, Senin 9 desember 2024, pukul 09:30 WITA .

<sup>63</sup>Hasil Wawancara dengan oleh Bapak Puger dan Bapak Nyong, masyarakat Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara Senin 9 desember 2024, pukul 10:00 WITA

dalam pemberdayaan masyarakat Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu sebagai berikut:

- 1) Kelemahan, aparat desa telah memiliki tugas masing-masing dari kepala desa di kantor desa itu sendiri, sedangkan yang menyangkut tentang pelaksanaan dana desa, ada yang berperan aktif didalamnya seperti sekretaris, kaur keuangan, kaur perencanaan dan anggota-anggota lainnya. Yang jadi pokok permasalahannya yaitu ada beberapa aparat desa yang tugasnya *double* dibanding dengan aparat yang lain, contohnya seperti Kaur Keuangan, Kaur Keuangan memiliki tugas *double* inilah merupakan kelemahan aparat desa dalam mengelola alokasi dana desa sehingga dalam pengelolaan alokasi dana desa tersebut jadi terhambat.
- 2) Kekuatan, adanya dorongan dari kepala desa bahwa dimana setiap manusia pasti memiliki skill, itulah yang dapat menunjang kita dalam melakukan sesuatu dalam hal ini sebagai aparat desa kita memiliki skill untuk membangun desa kita sendiri dari pemahaman yang di berikan kepala desa dan juga dari pengalaman yang sudah didapat dari kegiatan- kegiatan selama ini yang sudah dilaksanakan.
- 3) Peluang, Semangat kerja dan melihat kondisi bahwa mereka sebagai aparat desa yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar itu merupakan peluang bagi desa itu sendiri dan bagi dirinya sendiri dalam hal ini aparat desa.
- 4) Hambatan, aparat desa selalu lambat dalam penyeteran LPJ karena ketidakmampuan aparat desa dalam menyelesaikan LPJ tersebut karena tidak dapat membagi pekerjaan dikantor desa hal ini dikarenakan adanya sebagian

aparatus yang melakukan tugas secara double sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya pencairan dana desa.

Terkait dengan kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara yang memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terhambatnya terlaksananya dana desa di Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, Bapak Raswil.<sup>64</sup>

“Terhambatnya pelaksanaan dana desa itu diakibatkan karena kurangnya pengetahuan aparat tentang tugas dan wewangannya, serta adanya aparat yang melaksanakan tugas secara double”.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ketua BPDesa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, Bapak Zainal.<sup>65</sup>

“Masalah kemampuan aparat desa, selaku pelaksana dana desa itu sangat memiliki tanggungjawab yang besar terhadap tugas yang diberikan. Saya perhatikan semua aparat desa yang menjadi aktor dalam pengelolaan dana desa itu semangat dalam bekerja”.

Pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, Bapak Raswil.<sup>66</sup>

"Kalau tentang kekuatan aparat desa dalam pelaksanaan dana desa di desa ini, saya sudah melihat kinerja mereka beberapa tahun kemarin bahwa dimana mereka apabila diberikan tugas maka mereka akan mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik, contohnya dalam pengelolaan alokasi dana desa ini".

---

<sup>64</sup>Hasil wawancara oleh Kepala Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, Bapak Raswil. Senin 9 desember 2025, pukul 10;30 Wita

<sup>65</sup>Hasil wawancara oleh bapak Ketua BPDesa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, Bapak Zainal, senin 11 desember 2024, pukul 11:20 WITA.

<sup>66</sup> Hasil wawancara oleh Kepala Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, Bapak Raswil. , senin 11 desember 2024, pukul 11:20 WITA.

Desa dikenal sebagai miniature negara dimana pemerintahannya berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, aparat pemerintah desa tidak cukup jika hanya dibekali oleh pengalaman tanpa pengetahuan dan pendidikan yang baik. Pembangunan desa sangat ditentukan dalam semua elemen yang ada dalam masyarakat, baik itu perangkat desa maupun masyarakat terlibat aktif dalam menentukan kebijakan dalam pembangunan desa. Ini juga didukung oleh semua elemen yang ada di desa.

**b. Strategi pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat**

1) Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu dalam hal perencanaan APBDes tahun 2022 dimulai tahun 2021 atau di rencanakan dari tahun sebelumnya. Proses perencanaan APBDes tahun 2022 itu diambil dari perencanaan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan). Rencana APBDes 2022 disusun dari tahun 2021. Tahap perencanaan Pengelolaan APBDes di Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan musrembang.

Bapak Raswil selaku Kepala Desa, Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara menjelaskan bahwa:

“Di Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara ini dalam proses perencanaan pembangunan dalam pelaksana APBDes juga menyusun tim khusus yang terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris desa selaku Penanggung Jawab Administrasi

(PJAK), bendahara desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan di bantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa”.

Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan masyarakat desa. Bapak arsul selaku Sekertaris Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara menjelaskan bahwa:<sup>67</sup>

“Musrenbang desa dilaksanakan 1 tahun sekali di bulan Februari. musrenbang desa dihadiri oleh BPD, kepala dusun dan tokoh masyarakat sebagai perwakilan wilayah untuk menyampaikan kebutuhan yang ada di desa, sehingga nantinya dapat diprioritaskan kebutuhan masyarakat masing-masing wilayah dusun”

Musrembang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat. Dari hasil pengamatan peneliti untuk tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah, kondisi tersebut ditunjukan dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang hadir maupun yang menyampaikan aspirasi/pendapat dalam musrembang yang telah dilaksanakan.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Uni dan Bapak Hamsul selaku masyarakat Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara melalui kutipan berikut ini.

“Pada proses perencanaan penggunaan dana desa kami dilibatkan melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa untuk pengalokasian perencanaan pembangunan desa. Dengan adanya musyawarah diharapkan akan mampu memfasilitasi kebutuhan kami, terutama kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat”.

---

<sup>67</sup>Hasil wawancara Bapak arsul selaku Sekertaris Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, senin 9 desember 2024, pukul 13:00 WITA.

“Kami sebagai warga akan selalu memberikan masukan berupa usulan untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan desa, dan tentu akan dipilih kembali kegiatan mana yang akan disetujui oleh aparat desa. Kami berharap dengan sumbangsih usulan dari warga akan mampu meningkatkan kesejahteraan kami”.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Kepala Desa, Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu yaitu Bapak Raswil mengenai bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan musrembang desa, yaitu sebagai berikut:<sup>68</sup>

“Perencanaan APBDes tahun 2022 sudah dilakukan ditahun sebelumnya yaitu tahun 2021, begitu juga untuk tahun 2023 itu sudah dilakukan di tahun 2022. Pada perencanaan tahun 2024 ini tentunya kami mengadakan Musrembang Desa dengan mengundang masyarakat Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara untuk berpartisipasi, akan tetapi pada kenyataan yang terjadi di lapangan banyak masyarakat yang tidak hadir, pada umumnya masyarakat yang hadir hanya perwakilan dari tiap dusun dan beberapa Tokoh Agama, ditambah lagi tidak ada aspirasi yang mereka sampaikan pada saat musrembang desa sedang berjalan. Ketika tahun 2020 pembangunan desa sudah dimulai, pada awal pembangunan kami mulai dari perbaikan dan pemeliharaan jalan. Nah dari sinilah sudah mulai timbul keingintahuan masyarakat terkait dengan dana desa dan pembangunan. Mereka sudah mulai bertanya-tanya selain jalan fasilitas apa saja yang nantinya akan di bangun desa dan dari mana asal dananya. Karena masyarakat sudah banyak yang mulai paham tentang dana desa dan proses pembangunan desa jadi untuk kegiatan Musrembang yang dilakukan di tahun berikutnya sudah mulai banyak masyarakat yang turut serta berpartisipasi menghadiri musrembang sekaligus juga memberikan masukan-masukan terkait pembangunan yang akan dilakukan di tahun-tahun berikutnya”.

Sudah sangat jelas bahwa pengelolaan dana desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (PerDes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan dan desa harus memenuhi kaidah *good governance* yang harus

---

<sup>68</sup>Hasil wawancara kepada Kepala Desa, Desa, Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu yaitu Bapak Raswil, senin 9 desember 2024, pukul 13:30 WITA.

dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Kepala Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara Bapak Raswil mengemukakan bahwa:

“Penggunaan dana desa tersebut harus mengacu pada perbup, sehingga dengan diterimanya dan tersebut desa membuat program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun program yang telah kami bangun seperti drainase, duicker, pengerasan, pengadaan jembatan, hingga MCK keluarga”.

Setelah melakukan musrembang, langkah selanjutnya adalah penyusunan RKPDes, dimana didalam RKPDes termuat segala rencana kerja pemerintah desa pada tahun anggaran. RKPDes disusun berdasarkan kesepakatan hasil musrembang. Setiap daftar usulan dipilah dan dipilih mana yang akan menjadi prioritas penganggaran pada tahun anggaran berjalan.

## 2) Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara adalah desa dengan luas wilayah sekitar 1.851 Ha, yang terdiri dari 4 dusun. Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara yang sebaran jumlah penduduknya tergolong padat. Pada tahun 2020 jumlah penduduk yang tercatat adalah mencapai 842 KK dengan jumlah jiwa mencapai 1.593 jiwa yang terdiri dari 788 jika adalah laki- laki dan 805 jiwa adalah perempuan.

Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara pada tahun 2022 mendapat total pendapatan sebesar Rp.1.356.537.800. Untuk penggunaan pendapatan dana desa di Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu digunakan untuk 4 bidang. Yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp.318.900.900, dan Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar Rp.919.829.900, dan bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.45.182.000, dan bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.36.125.000.

Sedangkan pada tahun 2023 Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu mendapat total pendapatan sebesar Rp.1.728.678.211 yang diperoleh dari pendapatan dana transfer terdiri dari Dana Desa sebesar Rp.1.181.941, dari bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp 17.319.211, dan dari alokasi dana desa sebesar Rp 529.418.000.

Untuk penggunaan pendapatan dana desa di Desa Buntu Awo digunakan untuk 4 bidang. Yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp. 490.302.359, dan Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar Rp. 1.164.741.000, dan bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.47.010.000, dan bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.45.840.000. Untuk tahun 2024 Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu mendapat Total Pendapatan sebesar Rp 1.463.797.000 Yang diperoleh dari pendapatan dan transfer terdiri dari alokasi Dana Desa sebesar Rp. 478.674.000, dan dana desa sebesar Rp. 985.123.000.

### 3) Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa proses penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan bendahara desa adalah melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ini akan disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Dokumen yang digunakan untuk penatausahaan transaksi penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Untuk proses pelaporan, kepala desa akan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun kepada bupati. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Selanjutnya kepala desa akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa yang dilampiri format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan, format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menjabarkan lebih lanjut bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Bendahara Desa, Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu yaitu Bapak Yammur mengenai bagaimana pertanggung jawaban aparat desa terkait dengan penggunaan dana desa,

yaitu sebagai berikut:<sup>69</sup>

“Untuk Pertanggung jawaban aparat desa ke masyarakat terkait dengan dana desa disini nantinya pihak desa akan menyampaikan laporan yang telah disusun oleh sekretaris dan bendahara desa. Laporan tersebut nantinya akan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan menggunakan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Contohnya seperti pembuatan spanduk yang berisi rincian penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan, penyerapan dana, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa, yang dilakukan musyawarah sebelumnya dengan masyarakat desa”.

Penyampaian laporan juga dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu tim pelaksana tingkat desa dan diketahui oleh kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan. Tim pendamping tingkat kecamatan tersebut membuat laporan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya kepada bupati atau kepala badan pemberdayaan masyarakat.

Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara dalam keterlibatan pembuatan laporan APBDes yaitu sekretaris desa dan bendahara. Proses laporannya adalah tim pelaksana kegiatan disertai anggaran yang direncanakan oleh sekretaris desa dibuat laporannya dan diketahui oleh kepala desa. Pelaporan penggunaan dana di Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu meliputi:

- a) Laporan berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah relisasi penerimaan dana, dan realisasi belanja dana desa. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi

---

<sup>69</sup>hasil wawancara peneliti kepada Bendahara Desa, Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu yaitu Bapak Yammarr, Selasa 10 desember 2024, pukul 08:00 WITA.

penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa.

- b) Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari tim pelaksana tingkat desa dan diketahui kepala desa kemudian ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Tim pendamping tingkat kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada tim keuangan bupati.

Bapak Raswil selaku Kepala Desa, Desa Buntu Awo Kecamatan

Walenrang Utara menjelaskan bahwa:

“Desa sudah memiliki laporan pertanggungjawaban untuk tahunan. Desa juga sudah memiliki fasilitas sistem informasi yang memadai serta sumber daya manusia yang handal untuk mengelola keuangan desa dan membuat laporan pertanggungjawaban dana desa. Laporan pertanggungjawaban juga sudah diinformasikan kepada masyarakat dengan menempel salinan laporan tersebut di papan pengumuman. Menurut saya, proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sudah dilaksanakan secara akuntabilitas.”

Pernyataan kepala desa tersebut sudah sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban dan unsur akuntabilitas yang ada. Laporan pertanggungjawaban memang sudah harus disiapkan oleh desa dan diinformasikan kepada masyarakat setempat agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana proses pengelolaan keuangan desa yang dialaminya.

- 4) Pemberdayaan dalam Bentuk Fisik

Pembangunan sektor infrastruktur jalan merupakan salah satu sektor vital untuk memacu pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan pemberdayaan yang pada dasarnya merupakan sektor yang menghubungkan berbagai macam aktivitas ekonomi masyarakat. Pembangunan prasarana jalan memiliki fungsi aksestabilitas untuk membuka daerah yang kurang berkembang dan fungsi mobilitas daerah yang

telah berkembang.

Pembangunan infrastruktur jalan menuju pemukiman warga merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan dari dana desa dengan tujuan agar terjadi pemerataan pembangunan yang selama ini tidak dirasakan oleh beberapa pihak karena faktor geografis. Pembangunan jalan berdampak pada aspek sosial masyarakat tersebut, terbuka jalan warga dirasakan dari aspek sosial masyarakat yang dulunya warga kampung ini dipandang sebelah mata karena tinggal dekat hutan yang jauh dari jalan umum dan jalan kesana hanya jalan setapak, namun sekarang dengan terbukanya jalan yang layak dan memadai warga merasa derajat sosialnya meningkat.

Melihat pembangunan dari pemerintah desa yang di dorong dengan adanya program dana desa dari tahun 2021 sampai 2024, terdapat tanggapan dari masyarakat Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara. Dalam wawancara dengan Bapak Ahmad Zainuri, dikatakan bahwa:<sup>70</sup>

“Sekarang memang pemerintah desa kelihatan pembangunannya, seperti ada pembangunan jalan dan yang lainnya juga. Ini bagus untuk kita semua, biar lebih baik jugakan desanya, lebih maju juga. Yang penting terus berlanjut aja pembangunannya.”

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Rahman dalam wawancara:

“Bagus ya adanya pembangunan jalan dan jembatan, gorong-gorong, biar lebih memudahkan juga untuk masyarakat. Dan sekarang itu, cukup baguslah Pemerintah Desa Buntu Awo dalam masalah pembangunan, lebih terasa.”

Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, pastinya berdasarkan apa yang menjadi usulan dari setiap

---

<sup>70</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Zainuri, selasa 10 desember 2024, pukul 09:00 WITA

masyarakat, hal ini dimaksud agar pembangunan atau pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara benar-benar dapat terasa manfaatnya.

#### 5) Infrastruktur Jalan Pertanian

Pembangunan infrastruktur jalan pertanian masyarakat merupakan salah satu cara mempermudah akses petani untuk melakukan aktivitas bertani. Tempat pertanian yang jauh terpisah dengan tempat pemukiman warga menjadi salah satu faktor untuk melakukan pembangunan jalan untuk menunjang perekonomian masyarakat. Pembangunan infrastruktur jalan pertanian dibiayai dari dana desa yang dilakukan secara bertahap.

Pembangunan jalan tani tersebut sangat dibutuhkan guna memperlancar aktivitas masyarakat dalam pertanian. Sebab jalan yang biasanya digunakan masyarakat masih menyulitkan petani karena jalan yang mereka lalui masih jalan setapak yang belum memadai. Seperti di ketahui bahwa masyarakat Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara mayoritas petani seperti padi, tambak, sayur-sayuran dan lain-lain.

Pembangunan jalan pertanian telah memberi kontribusi bagi masyarakat petani untuk mempermudah para petani untuk melakukan aktivitas pertanian. Pembangunan infrastruktur jalan pertanian menambah semangat petani dalam bertani karena akses ketempat bertani sudah mudah ditempuh dengan kendaraan. Hal ini tidak terlepas dari penyesuaian kebutuhan masyarakat Fasilitas ini memberi dorongan kepada petani untuk lebih semangat bekerja karena akses yang sudah memadai.

6) Pengadaan MCK Keluarga

MCK keluarga berupa jamban merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari. Pengadaan MCK keluarga berupa jamban keluarga ini diharapkan dapat menjadikan masyarakat Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara memiliki perilaku hidup bersih.

7) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) merupakan mitra desa dalam mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sebagai mitra desa dalam mewujudkan tugasnya pemerintah desa memberi dana yang bersumber dari dana desa untuk mewujudkan kegiatan PKK. Kegiatan PKK yang dana nya bersumber dari dana desa bertujuan untuk memberdayakan kelompok wanita desa untuk meningkatkan keterampilan sebagai sumber penghasilan ekonomi. Pemberian dana ini merupakan salah cara memotivasi dan memberi dukungan kepada kaum wanita untuk menggali potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan dan membuka akses sumberekonomi.

8) Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa saat ini diatur dengan Permendagri 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan Dana Desa sangat berpengaruh terutama dalam

penyusunan skala prioritas dalam penetapan rencana kegiatan dan mempertimbangkan potensi desa, kebutuhan masyarakat sehingga hasil pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dapat dirasakan secara optimal bagi seluruh lapisan masyarakat desa. Dimana dapat diterima semua pihak, semua proses perencanaan dan pemeliharannya.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala desa, dimana tugas dan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa yaitu membantu dalam memasyarakatkan tujuan, prinsip dan kebijakan Dana Desa kepada masyarakat, memberikan pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Dana Desa, memberikan saran-saran terhadap pelaksanaan Dana Desa, memastikan adanya keterpaduan dan mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan pelaksanaan Dana Desa dan membangun kerja sama yang sinergis dengan Kepala Desa, dalam rangka menyukseskan keberhasilan penggunaan Dana Desa.

Harapan dari pemberian Dana Desa yang terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat tercapai diantaranya terwujudnya kelembagaan di desa yang mandiri yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan, tersedianya sarana dan prasarana utama sebagai pendukung kemajuan dan perkembangan desa, terselenggaranya pemberdayaan di desa serta terjadinya proses pembelajaran dalam masyarakat terkait pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

Bentuk pengawasan BPD terhadap penggunaan Dana Desa diantaranya adalah pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Berikut akan diuraikan kedua bentuk pengawasan tersebut yaitu:

a) Pengawasan Langsung

Bentuk pengawasan langsung yang dilaksanakan adalah dengan cara mendatangi suatu unit atau bagian kerja yang diawasi. Adapun pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan dana desa, sebagaimana yang dikatakan oleh ketua BPD Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, bahwa:<sup>71</sup>

”Dalam tahapan pelaksanaan alokasi dana desa pengawasan yang kami lakukan adalah pengawasan secara langsung untuk memantau pelaksanaan kegiatan atau program yang dilakukan oleh pemerintah desa”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengawasan langsung dalam tahapan pelaksanaan Dana Desa sangat penting dilakukan untuk memastikan agar tujuan penggunaan Dana Desa bisa tercapai sesuai dengan program yang telah direncanakan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mengatakan bahwa:

“Kalau dalam tahapan pelaksanaan biasanya pengawasan yang kami lakukan adalah turun langsung kelapangan untuk memantau program penggunaan alokasi dana desa apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya atau tidak dan jika ada hal-hal yang kami temukan dilapangan tidak sesuai maka kami akan langsung menyampaikan kepada pemerintah desa”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh anggota Badan

---

<sup>71</sup>Hasil wawancara oleh ketua BPD Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, selasa 10 desember 2024, pukul 09:30 WITA.

Permasyarakatan Desa sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, sehingga program yang telah direncanakan sebelumnya bisa tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

Dalam pelaksanaan kegiatan desa, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan bukan sebatas untuk membantu dalam perealisasiannya saja tetapi untuk mengawasi setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sehingga bisa terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Sebagaimana yang dikatakana oleh Ketua BPD Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, bahwa:

“Mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah desa sudah cukup baik dimana pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masyarakat selalu ada yang aktif dan terlibat di dalamnya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah desa sudah cukup baik, hal tersebut dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang hadir pada saat diadakannya kegiatan-kegiatan atau pelaksanaan program pemerintah desa.

Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa dalam pengelolaan Dana Desa sangat penting terutama dalam penyusunan skala prioritas dalam penetapan rencana kegiatan dan mempertimbangkan potensi desa, dan kebutuhan masyarakat sehingga hasil penggunaan Dana Desa dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat desa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tokoh masyarakat yang ada di Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara mengenai fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa, bahwa:

“Saya melihat BPD sebagai lembaga pengawasan kurang terlihat dimasyarakat, sehingga sebagian masyarakat kurang mengetahui tentang fungsi BPD itu sendiri”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengurus PBD dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas belum maksimal, itu terlihat dari masih adanya anggota BPD yang kurang aktif dalam melakukan fungsinya sebagai pengawas dalam pemerintahan desa. Serta berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya terutama dalam penggunaan Dana Desa sudah cukup baik, dimana pengurus BPD sudah melakukan pengawasan secara langsung.

Selain itu tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, khususnya dalam mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah cukup baik, hal tersebut dilihat dari kehadiran masyarakat pada saat diadakannya kegiatan atau pelaksanaan program pemerintah desa.

b) Pengawasan Tidak Langsung

Bentuk pengawasan tidak langsung yang dilakukan adalah mengadakan penilaian laporan yang disampaikan oleh pihak yang diawasi. Tahapan pelaporan ini merupakan tahapan yang sangat penting karena untuk memenuhi tanggungjawab pemerintah desa kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan desa guna kepentingan masyarakat desa. Pelaporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa ini menyatu dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga format pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa dengan memperhatikan bukti penunjang dari setiap pos anggaran yang dikeluarkan. Penyusunan laporan pertanggungjawaban

pengelolaan Dana Desa (ADD) di Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara disusun oleh bendahara desa sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, bahwa:

“Pembuatan laporan pertanggungjawaban disusun oleh bendahara desa yang dibantu oleh pendamping desa, kemudian laporan itu akan disampaikan kepada Bupati melalui pihak kecamatan dan ada juga yang diberikan kepada BPD, pelaporannya itu pada akhir tahun”.

Berdasarkan pernyataan diatas diketahui bahwa penyusunan laporan pertanggungjawaban yang disusun sebelumnya oleh bendahara desa yang nantinya laporan tersebut akan disampaikan kepada Bupati melalui Camat serta kepada BPD, penyusunan laporan ini biasanya dibuat pada akhir tahun anggaran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua BPD Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara bahwa:

“Untuk bentuk laporan pertanggungjawaban kepala desa kepada kami itu bentuknya laporan tertulis yang dimana itu berisikan laporan program yang telah dilaksanakan pemerintah desa, biasanya itu diserahkan kepada kami melalui rapat yang diadakan di akhir tahun”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa, pertanggungjawaban kepala desa kepada BPD dalam hal pengelolaan Dana Desa (ADD), kepala desa memberikan laporan tertulis yang memuat laporan hasil penyelenggaraan pemerintah desa yang telah dilaksanakan selama satu tahun, pemberian laporan ini sebagai bentuk kewajiban Kepala Desa untuk menyampaikan segala kegiatannya kepada Badan Permusyawaratan desa. Pengawasan terhadap dana desa ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran.

Setelah anggota Badan Permusyawaratan Desa menerima laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dari kepala desa maka pengurus Badan Permusyawaratan Desa yang dipimpin oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa akan mengadakan rapat untuk mengevaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut. hal ini senada dengan yang dikatakan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara yang mengatakan bahwa:<sup>72</sup>

“Laporan yang diserahkan kepada kami akan di bahas kembali bersama dengan pengurus BPD untuk dievaluasi. Setelah melakukan evaluasi apabila dalam laporan masih ada yang kurang jelas atau ketidaksesuaian maka akan dikembalikan lagi kepada pemerintah desa, setelah ada penjelasan dari pihak pemerintah desa maka kami akan musyawarahkan kembali bersama pengurus BPD”.

Sementara wawancara dengan sekretaris Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara mengenai pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa kepada Masyarakat, mengatakan bahwa:

“Kalau untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat biasanya dibuatkan dalam bentuk baliho kemudian di pajang didepan kantor desa, jadi masyarakat lebih mudah mengetahuinya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa dalam laporan penggunaan keuangan desa kepada masyarakat, pemerintah desa menginformasikan realisasi program yang telah dilaksanakan beserta rincian anggaran yang digunakan di pajang didepan kantor desa dalam bentuk baliho sudah cetak.

---

<sup>72</sup>Hasil wawancara dikatakan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, selasa 10 desember 2024, pukul 10:00 WITA.

Hal tersebut bertujuan agar masyarakat yang ingin mengetahui setiap penggunaan keuangan desa dapat dengan mudah mendapatkan informasi, sehingga tidak ada lagi anggapan dari masyarakat bahwa dalam pengelolaan keuangan desa terjadi penyimpangan dimana masyarakat menganggap pemerintah desa tidak transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa.

**c. Dampak pengelolaan alokasi dana desa terhadap peningkatan ekonomi masyarakat**

Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan Dana Desa adalah:<sup>73</sup>

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- 4) Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- 5) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
- 6) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- 7) Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana:

---

<sup>73</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

- 1) Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat.
- 2) Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
- 3) Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan serta kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, dan layanan dasar.
- 4) Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.<sup>74</sup>

Prioritas penggunaan dana desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, dimana prioritas penggunaan dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya.<sup>75</sup>

Wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara yaitu Bapak Raswil menyatakan bahwa:

“Sebenarnya pemberdayaan sebelum adanya dana desa itu ada, namun terbatas dalam artian seperti kegiatannya atau pendanaannya masih bersifat swadaya. Maka pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi misalkan memang tidak cukup berjalan atau terlihat di masyarakat. Selain itu juga, lembaga-lembaga yang bersinergi dengan desa memang belum berjalan maksimal, seperti pemberdayaan perempuan dalam melatih ibu-ibu pembuatan atap rumbia salah satunya, pemberdayaan pada para pemuda, program-programnya belum berjalan maksimal”

---

<sup>74</sup> Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2015). *Panduan Umum Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)*. Jakarta: Kemendes PDTT

<sup>75</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024

Wawancara dengan Bapak Arsul selaku Sekretaris Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara,<sup>76</sup> beliau mengatakan hal yang sama, dimana pemberdayaan yang telah dilakukan pemerintah desa terhalang dengan kurangnya dana dan sebelum adanya dana desa pemerintahan desa hanya melakukan pemberdayaan yang minim dengan dana seadanya.

"Keadaan ekonomi masyarakat Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara secara umum sebenarnya tidak terlalu buruk, baik itu sebelum ada dana desa ini. Masyarakat ada yang bertani, dan juga sebagai buruh tani, berdagang, PNS dan yang lainnya. Dana desa ini diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur untuk pada tahun ini. Maka keadaan infrastruktur sebelum adanya dana desa cukup berbeda dengan setelah adanya dana desa. Sebelum adanya dana desa, keadaan infrastruktur belum mendapatkan perbaikan, seperti jalan dan jembatan belum ada perbaikan. Keadaan infrastruktur sebelum adanya dana desa kondisinya kurang layak, seperti jalan di kampung-kampung yang rusak, jembatan juga sama. Selain itu juga, ketika kami pihak pemerintah desa mau mengadakan perbaikan infrastruktur misalkan, kami selalu berbenturan dengan dana yang tersedia, cukup sulit kalausebelum adanya dana desa".

Hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan masyarakat sebelum adanya dana desa sangat terbatas dalam segi pendanaan dan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara dikala itu bersifat swadaya gotong royong masyarakat dengan sukarela.

Dampak adanya peran dana desa dirasa sangat membatu dalam pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur di Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, dengan adanya dana desa pemerintah dapat menjalankan

---

<sup>76</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Arsul selaku Sekretaris Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, selasa 10 desember 2024, pukul 10:30 WITA

program program yang telah disepakati bersama antara pemerintah desa, masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara.

Pemberdayaan masyarakat setelah adanya dana desa pembangunan dan pemberdayaan mulai berjalan dengan lancar, dalam artiannya pembangunan terus meningkat dan berjalan membenahi infrastruktur desa seperti jalan dan parit yang setelah adanya dana desa dapat diperbaiki. Beberapa jalan desa yang tadinya keterbatasan sekarang meningkat menjadi jalan dan parit cor beton. Pemberdayaan adalah pemberi energi positif agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.<sup>77</sup> Dalam hal ini pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan adanya dana desa sebagai pendorong berjalannya program-program yang telah dibuat dapat dikatakan berhasil dalam hal pembangunan infrastruktur yang bertujuan menacapai kemandirian desa, yaitu desa yang tidak hanya sebagai objek penerima manfaat akan tetapi desa dapat menjadi subjek pengelolaan dana desa itu sendiri.

Wawancara yang dilakukan kepada ibu Rosdiana selaku pelaku ekonomi yang menerima manfaat dengan adanya dana desa menyatakan bahwa:<sup>78</sup>

“Adanya dana desa kami merasa sangat tertolong, karena sebelumnya kami yang hanya sebagai ibu rumah tangga hanya mampu berdiam diri dirumah tanpa berpenghasilan. Namun setelah adanya pembinaan ekonomi kreatif pembuatan atap rumbia yang di danai oleh dana desa, kami yang semula ibu rumah tangga yang tidak produktif menjadi produktif. Selain itu pula, kami bisa membuka distribusinya atap rumbia ini yang menjadi khas Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara dan mengeksplor keluar daerah”.

---

<sup>77</sup>Edi Suharto. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

<sup>78</sup>Hasil wawancara Wawancara yang dilakukan kepada ibu Rosdiana selaku pelaku ekonomi, selasa 10 desember 2024, pukul 11:30 WITA

Adanya dana desa yang telah digulirkan oleh pemerintah pusat untuk mendukung untuk meningkatkan pembangunan di desa dan pemerataan kesejahteraan secara menyeluruh, dalam artian pemerintah memandang jauh kepada desa sebagai ujung tombak pembangunan suatu negara. Dengan diberikan dana desa sebagai stimulan pembangunan dan pemberdayaan yang akan menjadikan desa yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Proses dalam pemberdayaan perlu dilakukan dengan sangat cermat, karena setiap tatanan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga tidak semua strategi yang berasal dan luar tatanan akan efektif, bahkan dalam banyak hal tidak jarang bersifat kontra produktif kebijakan yang diterapkan. Pemberdayaan memerlukan proses dalam penyesuaian berbagai sektor yaitu seperti budaya yang berkembang dalam masyarakat, dan kelembagaan melalui reinterpretasi, reaktualisasi, dan transformasi.

Wawancara dengan Bapak Arsul selaku Sekretaris Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara dikatakan bahwa:<sup>79</sup>

"Dampak adanya dana desa, pemerintah desa mengajak dan merangkul seluruh lapisan masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan agar bisa ditingkatkan dari berbagai elemen, baik itu pemberdayaan pendudukannya, kesejahteraannya, perempuannya, dan sebagainya, sedikit-sedikit kita tingkatkan demi perbaikan berbagai sektor. Contohnya adalah dalam kegiatan kesehatan yaitu pengkaderan posyandu dan dalam bidang pendidikan yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dibawah umur (PAUD) pemberdayaan LINMAS. serta dalam bidang pemberdayaan yaitu pembinaan dan pelatihan untuk ibu-ibu rumahan".

---

<sup>79</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Arsul selaku Sekretaris Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, selasa 10 desember 2024, pukul 13:30 WITA

<sup>79</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak

Hasil wawancara dengan sekretaris Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara dapat disimpulkan bahwa setelah adanya dana desa pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dapat meningkat. Contoh dari pemberdayaan dari segi ekonomi dapat dilihat dengan diadakanya Bumdes berupa warung desa yang menjual bermacam kebutuhan petani seperti alat pertanian, pupuk dan obat-obatan tanaman, sebagai salah satu solusi dalam membantu masyarakat desa yang mayoritas adalah petani meskipun dalam kenyataannya belum dapat dirasakan secara penuh oleh masyarakat. Serta pembinaan ibu-ibu rumahan dalam hal produksi atap rumbia.

Strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya.<sup>80</sup> Dapat dilihat bahwa pemerintah dan masyarakat selalu bekerjasama, bermusyawarah dan menyepakati usulan masyarakat membentuk program-program yang berkaitan dalam pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan ekonomi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat desa.

## **2. Pembahasan**

### **a. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buntu Awo**

Pengelolaan dana desa merupakan bagian dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Buntu Awo,

---

<sup>80</sup> Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama

terdapat berbagai faktor yang memengaruhi kelancaran pengelolaan dana desa. Faktor-faktor ini dapat dikategorikan ke dalam dua aspek besar, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

#### 1) Faktor Pendukung Pengelolaan Dana Desa

Faktor-faktor yang mendukung pengelolaan dana desa di Desa Buntu Awo salah satunya adalah motivasi dan dorongan dari Kepala Desa yang berupaya menumbuhkan kesadaran bahwa setiap aparat memiliki potensi dan keterampilan (*skill*) yang bisa dioptimalkan untuk membangun desa. Kepala desa juga berperan dalam memberikan pemahaman dan pengalaman kepada aparat melalui keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan desa. Semangat kerja dan rasa tanggung jawab aparat desa juga menjadi peluang positif bagi kemajuan desa. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun terdapat kekurangan dari sisi teknis, ada potensi besar yang bisa dikembangkan melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi. Kepala Desa juga menyampaikan bahwa aparat desa cenderung menyelesaikan tugas dengan baik jika diberi tanggung jawab yang jelas. Ini menunjukkan bahwa dengan manajemen kerja yang lebih efisien dan pembagian tugas yang proporsional, aparat desa mampu memberikan kontribusi optimal dalam pengelolaan dana desa.

#### 2) Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa

Salah satu faktor utama yang menghambat pengelolaan dana desa adalah kelemahan dalam struktur pembagian tugas di lingkungan aparat desa. Terungkap bahwa beberapa aparat desa, seperti Kaur Keuangan, harus menjalankan tugas ganda (*double job*), yang menyebabkan beban kerja tidak seimbang dan menghambat

efektivitas pelaksanaan tugas. Hal ini berdampak langsung pada keterlambatan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), yang selanjutnya berakibat pada terlambatnya pencairan dana desa. Pernyataan dari Kepala Desa Buntu Awo, Bapak Raswil, menegaskan bahwa kurangnya pemahaman dan pengetahuan aparat desa terhadap tugas dan wewenangnya juga menjadi kendala utama. Selain itu, menurut Ketua BPDesa, Bapak Zainal, semangat kerja memang tinggi, namun kemampuan teknis dalam menyelesaikan pekerjaan secara efisien masih menjadi tantangan. Kondisi ini menggambarkan bahwa penguatan kapasitas aparat desa melalui pelatihan dan pembekalan pengetahuan teknis menjadi hal yang sangat mendesak.

Sebagai pemerintahan terendah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Desa tidak hanya bergantung pada kinerja aparat pemerintah desa, tetapi juga pada partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa idealnya melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan penggunaan dana desa. Tanpa adanya pengetahuan dan pendidikan yang cukup, aparat desa akan kesulitan memahami dinamika pengelolaan dana, terutama dalam hal administrasi, perencanaan, dan akuntabilitas. Maka, dibutuhkan strategi penguatan kelembagaan desa serta kolaborasi antar perangkat desa dan masyarakat, demi menciptakan sistem pengelolaan dana desa yang efektif, transparan, dan akuntabel.

#### **b. Strategi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Buntu Awo**

Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Buntu Awo secara umum telah mengikuti mekanisme dan tahapan yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terlihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan yang telah dijalankan secara sistematis oleh aparat desa bersama masyarakat

1) Perencanaan pengelolaan dana desa

Tahapan perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Buntu Awo telah mengacu pada prinsip *partisipatif* yang diawali melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Dalam forum ini, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan di masing-masing wilayah dusun. Hal ini menunjukkan adanya kemauan dari pemerintah desa untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan kebutuhan pasti masyarakat. Namun, partisipasi masyarakat masih tergolong rendah, terutama pada fase awal kegiatan musrenbang. Hal ini dipengaruhi oleh minimnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan dalam proses perencanaan. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya kesadaran masyarakat, partisipasi mulai meningkat. Ini menunjukkan adanya progres positif dalam pembangunan desa berbasis kebutuhan warga.

2) Pelaksanaan dana desa yang berfokus pada pembangunan fisik dan pemberdayaan ekonomi

Penggunaan dana desa telah diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, MCK keluarga, dan jalan tani. Infrastruktur tersebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah dusun dan memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya petani yang menjadi mayoritas di desa tersebut. Selain itu, dana desa juga dimanfaatkan untuk mendukung

kegiatan pemberdayaan ekonomi melalui program seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). PKK memiliki peran strategis dalam memberdayakan perempuan agar memiliki keterampilan dan potensi ekonomi. Ini memperlihatkan bahwa strategi pengelolaan dana desa tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mengarah pada pembangunan sosial-ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

3) Pelaporan dan pertanggungjawaban yang dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas

Dalam aspek pelaporan dan pertanggungjawaban, pemerintah desa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan melibatkan bendahara dan sekretaris desa dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan disampaikan kepada bupati melalui camat dan diinformasikan kepada masyarakat melalui media baliho dan papan informasi desa. Langkah ini mencerminkan upaya untuk mewujudkan transparansi dan mencegah kecurigaan terhadap penyalahgunaan anggaran. Selain itu, penggunaan spanduk atau baliho sebagai sarana informasi publik sangat efektif dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

4) Pengawasan dan sinergitas BPD serta masyarakat dalam menjaga akuntabilitas dana desa

Pengawasan dana desa dilakukan melalui dua pendekatan langsung dan tidak langsung. BPD memiliki peran penting sebagai lembaga pengawasan dalam memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan rencana dan kebutuhan masyarakat. Meskipun dalam praktiknya masih ada tantangan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi BPD, namun pengawasan langsung dengan

turun ke lapangan dinilai efektif dalam menjaga integritas pelaksanaan dana desa. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam pengawasan kegiatan desa menambah nilai positif dari segi partisipasi dan keterbukaan. Hal ini mendorong terciptanya sistem pengawasan yang lebih inklusif.

Agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel, maka diperlukan juga mekanisme pengawasan. Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut, yaitu masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Camat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Bahkan dapat kita ikuti dalam perkembangan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan dana desa. Untuk tingkat pusat, pengawasan tersebut telah dilakukan sinergi dengan semua pihak. Agar mekanisme pengawasan tersebut semakin efektif maka dimungkinkan diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan adanya sanksi tersebut maka diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan dana desa.<sup>81</sup> Pemerintah pusat melakukan sinergi antar kementerian maupun dengan daerah secara berjenjang dengan melibatkan masyarakat dan aparat pengawas.

### **c. Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber di Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, terlihat bahwa alokasi Dana

---

<sup>81</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

Desa memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat serta pembangunan infrastruktur desa. Sebelum adanya Dana Desa, kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa bersifat terbatas baik dari segi jumlah maupun cakupan program. Hal ini dikarenakan anggaran yang tersedia hanya berasal dari swadaya masyarakat, yang membuat kegiatan pembangunan dan pemberdayaan berjalan lambat dan tidak maksimal.

Wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa mengungkapkan bahwa setelah Dana Desa dikururkan, prioritas penggunaan anggaran dialihkan ke pembangunan infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sekretaris Desa Buntu Awo yaitu Bapak Arsul, menjelaskan bahwa keadaan infrastruktur desa sebelum adanya Dana Desa sangat memprihatinkan. Jalan kampung rusak dan sulit dilalui, sementara jembatan penghubung antar dusun juga berada dalam kondisi tidak layak. Pemerintah desa mengalami kesulitan dalam melakukan perbaikan karena dana yang tersedia sangat terbatas. Namun, setelah adanya Dana Desa, pembangunan infrastruktur desa mulai dilaksanakan secara bertahap. Data dari RPJMDes Desa Buntu Awo Tahun 2022–2024 menunjukkan bahwa telah dibangun jalan rabat beton sepanjang kurang lebih 2.500 meter dan drainase beton sepanjang 1.800 meter. Selain itu, dua jembatan penghubung antar dusun telah diperbaiki menjadi jembatan beton yang lebih aman dan kokoh. Dampak dari pembangunan ini sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama petani, karena waktu tempuh distribusi hasil pertanian berkurang dari sekitar 1 jam menjadi hanya 20 menit, yang membantu mengurangi kerusakan hasil panen dan mempercepat proses penjualan.

Dana Desa juga dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat, contohnya dalam aspek pemberdayaan ekonomi, dampak Dana Desa juga sangat signifikan terutama bagi kaum wanita di Desa Buntu Awo. Ibu Rosdiana yang merupakan salah satu pelaku usaha dan telah menerima manfaat Dana Desa menyampaikan bahwa sebelum adanya program pelatihan, ia hanya beraktivitas sebagai ibu rumah tangga tanpa penghasilan. Setelah mengikuti pelatihan pembuatan atap rumbia yang didanai Dana Desa, ia dan kelompok ibu-ibu rumah tangga lainnya kini mampu memproduksi hingga 200 lembar atap per bulan, dengan tambahan penghasilan sekitar Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per keluarga. Produk ini bahkan sudah mulai dipasarkan ke desa-desa tetangga, sehingga memberi kontribusi terhadap peningkatan ekonomi lokal dan pengenalan produk khas desa.

Dana Desa juga dimanfaatkan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), meskipun pada tahap awal belum memberikan dampak yang maksimal. Namun, keberadaan BUMDes seperti warung desa yang menyediakan kebutuhan pertanian merupakan langkah awal dalam membangun kemandirian ekonomi desa dan mendukung para petani lokal. Lebih lanjut, pemerintah desa juga menggunakan Dana Desa untuk mendukung sektor lain yang turut berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat seperti bidang kesehatan (penguatan kader posyandu), pendidikan (penyediaan sarana PAUD), serta keamanan dan ketertiban melalui pemberdayaan LINMAS. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa tidak hanya fokus pada satu sektor, melainkan terintegrasi untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan menyeluruh.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

1. Berbagai faktor pendukung, seperti dorongan kuat dari kepala desa dan semangat kerja aparat desa, memainkan peran penting dalam kelancaran pengelolaan dana desa. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat, seperti pembagian tugas yang tidak merata di antara perangkat desa dan kurangnya pengetahuan serta pelatihan terkait pengelolaan dana desa, yang menghambat proses pelaksanaan dan pencairan dana desa.
2. Dalam hal strategi pengelolaan, perencanaan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui musyawarah desa (musrenbang) menjadi salah satu kunci utama dalam menciptakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun ada tantangan dalam hal partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa terus ditingkatkan melalui laporan penggunaan dana yang disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
3. Dampak positif dari pengelolaan dana desa terlihat pada peningkatan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Pembangunan infrastruktur yang lebih baik, seperti perbaikan jalan dan jembatan, meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi

distribusi produk lokal. Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya melalui pelatihan dan pembinaan pada ibu-ibu rumah tangga, telah membantu mereka untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Pembentukan BUMDesa juga memberikan kontribusi dalam memenuhi kebutuhan petani dan meningkatkan ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, pengelolaan alokasi dana desa di Desa Buntu Awo berhasil dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musrenbang dan memberikan pelatihan lebih lanjut bagi aparat desa, agar pengelolaan dana desa dapat lebih optimal dan membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat desa. Kolaborasi yang terus terjalin antara pemerintah desa dan masyarakat sangat penting dalam mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera.

## **B. Saran**

1. Pemerintah Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara diharapkan harus terus mengupayakan semaksimal mungkin untuk menjadikan dana desa seefektif mungkin, sehingga manfaat dari pengelolaan dana ini dapat memberikan manfaat yang besar untuk semua masyarakat Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara.
2. Masyarakat Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara diharapkan untuk dapat ikut serta dalam pengelolaan dana desa ini, baik dalam hal pembangunan di lapangan maupun dalam pengawasan terhadap Pemerintahan desa saat melakukan pengelolaan dana desa.

3. Harus adanya pembinaan kepada seluruh aparat desa agar kepala urusan maupun kepala seksi dapat mengetahui tugas dan wewenangnya. Sehingga nantinya tidak adanya aparat yang melaksanakan tugas secara profesional dan setiap aparat desa harus mempunyai integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. (2016). Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 83-103.
- Ambarwati, S. W. (2020). *Manajemen Program Dana Bergulir Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Masjid Agung Kota Kediri)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Amelia, I. (2018). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sijung Kang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 1(1), 42-53.
- Amir, A., Noerjoedianto, D., & Herwansyah, H. (2019). Studi Kualitatif Tentang Peran Kepala Puskesmas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Kesmas Jambi*, 3(1), 55-61.
- Arifudin, Moh, Fathma Zahara Sholeha, and Lilis Fikriya Umami. "Planning (Perencanaan) Dalam Manajemen Pendidikan Islam." *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 02 (2021): 162-183.
- Arifudin, Opan. "Manajemen Strategik Teori Dan Implementasi." (2021).
- Arina, A. I. S., Masinambow, V., & Walewangko, E. N. (2021). Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(3).
- Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Pertenakan Sapi Perah (Studi Kasus Desa Pudak Kulon, Kec. Pudak, Kab Ponorogo).
- Aziz, Antartila Rizki. "Evaluasi Kinerja Pegawai dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Cacat Tuna Netra pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Rehabilitas Penyandang Cacat Netra Provinsi Sumatera Selatan." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)* 1.1 (2018): 11-23.
- Azwardi, Sukanto, *Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan*,... h.3.
- Bawono, I. R. (2019). *Panduan penggunaan dan pengelolaan dana desa*. Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Calam, Ahmad, and Annah Qurniati. "Merumuskan visi dan misi lembaga pendidikan." *Jurnal Saintikom* 15, no. 1 (2016).
- Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung: FOKUSMEDIA, 2015), h. 54
- Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Malang, Jurnal Administrasi Publik, 2014), h. 2.
- Daud, Muhammad, and Yushita Marini. "Implementasi program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin." *Jurnal umaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum* 2.1 (2018): 29-38.
- Dewi, A. P., & Devi, Y. (2022). Upaya Bumdes Dalam Pengembangan Objek Pariwisata Green Bamboo Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Sri Bandung Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara). *Salam (Islamic Economics Journal)*, 3(2), 174-195.
- DR HA Rusdiana, M. M., H. Wardija, and M. AP. *MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH: Konsep Prinsip dan Aplikasinya di Sekolah/Madrasah*. Arsad Press, 2022.
- Dura, Justita. "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang." *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia* 10.2 (2021): 26-32.
- Edi Suharto. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Fadilla, Annisa Rizky, and Putri Ayu Wulandari. "Literature review analisis data kualitatif: tahap pengumpulan data." *Mitita Jurnal Penelitian* 1.3 (2023): 34-46.
- Falikha, F. (2022). *Penerapan Fungsi Manajemen Dakwah Pada Ikatan Remaja Masjid Manarul Huda Desa Samirejo* (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).
- Farida, Leli. "Analisis Strategi Pengembangan Produk Pangan Lokal Dalam Meningkatkan Industri Kreatif Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur)." PhD diss., UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Faruqi, D., & Hakim, L. (2022). Prinsip Manajemen Perspektif Pendidikan Islam. *Roqooba Journal of Islamic Education Management*, 2(1), 34-41.

Febriani, Elsa Selvia, et al. "Analisis data dalam penelitian tindakan kelas." *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* 1.2 (2023): 140-153.

Febriani, Elsa Selvia, et al. "Analisis data dalam penelitian tindakan kelas." *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* 1.2 (2023): 140-153.

Fitri Amalia, 2022, Ekonomi Pembangunan, Bandung : Widana Bhakti Persada Bandung, hal 2

Fitri Amalia, 2022, Ekonomi Pembangunan, Bandung : Widana Bhakti Persada Bandung, hal 9

Frisdiantara, C. And Mukhklis, I. (2020) Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian Teoretis Dan Empiris. Cetakan 1. Malang: Universitas Kanjuruhan Malang. Ketut Gede Rudiarta, 2020, Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa, *Jurnal Analogi Hukum*, No. 2 (1)

Hasil wawancara oleh Kepala Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, Bapak Raswil. Senin 9 desember 2025, pukul 10:30 Wita

Hasil wawancara Bapak arsul selaku Sekertaris Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, senin 9 desember 2024, pukul 13:00 WITA.

Hasil wawancara kepada Kepala Desa, Desa, Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu yaitu Bapak Raswil, senin 9 desember 2024, pukul 13:30 WITA.

Hasil wawancara oleh ketua BPD Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, selasa 10 desember 2024, pukul 09:30 WITA.

Hasil Wawancara dengan Bapak

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Zainuri, selasa 10 desember 2024, pukul 09:00 WITA

Hasil Wawancara dengan Bapak Arsul selaku Sekretaris Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, selasa 10 desember 2024, pukul 10:30 WITA

Hasil Wawancara dengan Bapak Arsul selaku Sekretaris Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, selasa 10 desember 2024, pukul 13:30 WITA

Hasil wawancara dengan ibu Selfi, selaku masyarakat Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang utara, Senin 9 desember 2024, pukul 09:30 WITA .

Hasil wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara bapak Irwan Joggo. Senin 9 desember 2024, pukul 08:30 WITA .

Hasil Wawancara dengan oleh Bapak Puger dan Bapak Nyong, masyarakat Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara Senin 9 desember 2024, pukul 10:00 WITA

Hasil wawancara dikatakan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, selasa 10 desember 2024, pukul 10:00 WITA.

Hasil wawancara oleh bapak Ketua BPDesa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, Bapak Zainal, senin 11 desember 2024, pukul 11:20 WITA.

Hasil wawancara oleh Kepala Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, Bapak Raswil. , senin 11 desember 2024, pukul 11:20 WITA.

Hasil wawancara peneliti kepada Bendahara Desa, Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu yaitu Bapak Yamar, Selasa 10 desember 2024, pukul 08:00 WITA.

Hasil wawancara Wawancara yang dilakukan kepada ibu Rosdiana selaku pelaku ekonomi, selasa 10 desember 2024, pukul 11:30 WITA

Hermanto, W., & As'ari, H. (2023). Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 317-328.

Ikhsan, Muhammad, Achmad Asrori, and N. H. Murtafiah. "Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik Di Sma Jam'iyah Islam'iyah Kabupaten Ogan Ilir." *Unisan Jurnal* 2.1 (2023).

Juwono, Onny. "Analisis Manajemen Strategik Perusahaan Waralaba (Franchise) Studi Kasus di Restoran Cepat Saji McDonald'S." *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen* 1, no. 1 (2012).

Kapisa, Mateus Benyamin, Siti Aisah Bauw, and Rumas Alma Yap. "Analisis tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan terhadap pendapatan kepala keluarga (KK) di Kampung Manbesak Distrik Biak Utara Provinsi Papua." *Lensa Ekonomi* 15.01 (2021): 131-150.

Kartika Putri, 2020, Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta: Dharma Bakti

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2015). *Panduan Umum Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)*. Jakarta: Kemendes PDPT
- Leonard-Barton, D. (1992). Core Capabilities and Core Rigidities: A Paradox in Managing New Product Development. In *Management Journal* (Vol. 13)
- Lisa, N. (2024). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Empiris Di Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan)* (Doctoral Dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Mahulae, D. Y. D. (2022). *Pengantar Managemen*. PT Inovasi Pratama Internasional.
- Mansur, Mansur, Muhammad Tahmid Nur, Fasiha Fasiha, and M. Ihsan Darwis. "Kebijakan Dana Desa di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara Perspektif Al Maslahah Al Mursalah." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 14, no. 2 (2024): 123-136.
- Nasir, Mohammad, M. Bahri Ghazali, and Fitri Yanti. "Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa Melalui Pengembangan Masyarakat Islam Di Kabupaten Pringsewu Lampung." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 15, no. 2 (2023): 191-212.
- Naway, F. A. (2016). Strategi pengelolaan pembelajaran. *Gorontalo: Ideas Publishing*.
- Nilamsari, Natalina. "Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif." *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13.2 (2014): 177-181.
- Nurmiati, N. (2022). *Strategi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Galeso Kecamatan Wonomulyo (Analisis Manajemen Syariah)* (Doctoral dissertation, IAIN PAREPARE).
- Nurmiati, N. (2022). *Strategi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Galeso Kecamatan Wonomulyo (Analisis Manajemen Syariah)* (Doctoral dissertation, IAIN PAREPARE).
- Pelealu, Angelina, Grace B. Nangoi, and Natalia YT Gerungai. "Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung." *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 13.04 (2018).

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
- Prihatini, Y. Y. (2020). Dampak Pembangunan Terhadap Perubahan Mata Pencaharian Masyarakat Pesisir Dan Sekitar Kecamatan Pulomerak.
- Putra, Y. K. (2022). *Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sungai Radak Satu Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya* (Doctoral Dissertation, Universitas Tanjungpura).
- Rahayu, K. W. (2017). Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada sekretariat daerah Kabupaten Kutai Timur. *Ekonomia*, 6(1), 177-182.
- Ramlawati, S. E., et al. *Pengantar Ekonomi*. Cendikia Mulia Mandiri, 2022.
- Rukin, S. Pd. *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Sarnoto, A. Z. (2013). Urgensi Peningkatan Mutu Pengelolaan Pesantren Dalam Era Global. *Educare*, 3(3), 49-60.
- SOFI KOIDATUL MAQFIROH, Skripsi: “*Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “PARIKESIT” Desa Wirogomo Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang*” (Semarang: UNDIP, 2024)
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Sulistiani, D., Prayogo, Y., & Saputra, O. (2025). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Teluk Tigo Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, 9(1).
- Syah, Arzal (2023) Pengaruh Kompetensi Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Laporan Realisasi Anggaran Dengan Pengendalian Internal Sebagai Intervening. <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/30350>
- Tharob, H. (2022). *Manajemen Keuangan Himpunan Mahasiswa Prodi IAIN Ambon Perspektif Keuangan Syari'ah* (Doctoral dissertation, IAIN AMBON).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- United Nations Development Programme (UNDP). (1990). Human Development Report. New York: Oxford University Press
- Wajdi, Farid, and Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Wowor, M., Singkoh, F., & Waworundeng, W. (2019). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Yunus, Eddy. *Manajemen strategis*. Penerbit Andi, 2016.
- Ziliwu, Syukur Hati, Rohpinus Sarumaha, and Darmawan Harefa. "Analisis kemampuan koneksi matematika pada materi transformasi siswa kelas xi smk negeri 1 lahusa tahun pembelajaran 2020/2021." *Afore: Jurnal Pendidikan Matematika* 1.1 (2022): 15-25.
- Zullian, M. R., Poti, J., & Okparizan, O. (2024). *Kapabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga* (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

*Lampiran 1: Pedoman Observasi*

**PEDOMAN OBSERVASI**

Hari/Tanggal Observasi :

Tempat :

<b>No</b>	<b>Aspek yang Diamati</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Batas Administratif Desa	
2.	Interaksi antar warga	
3.	Rutinitas keseharian masyarakat setempat	
4.	Kondisi sosial dan ekonomi	
5.	Program - program yang di danai oleh Dana Desa	
6.	Pelayanan terhadap masyarakat	
7.	Peran pemerintah desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat	

*Lampiran 2: Pedoman Wawancara*

**PEDOMAN WAWANCARA**

**A. Kepala Desa Buntu Awo, Kec. Walenrang Utara, Kab. Luwu**

**I. Identitas Diri**

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :

Pendidikan :

**II. Daftar Pertanyaan**

1. Berapa Dana Desa tahun 2021, 2022, 2023, 2024 yang diberikan Pemerintah pusat kepada Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang?

.....  
.....  
.....

2. Apakah pengelolaan Dana Desa sudah transparan dan bagaimana bukti transparannya?

.....  
.....  
.....

3. Program-Program apa saja yang di danai oleh Dana Desa tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat?

.....  
.....  
.....

4. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Buntu Awo?

.....  
.....  
.....

5. Berdasarkan peraturan presiden tentang Bantuan langsung tunai yang selama ini dijadikan instrument pelaksanaan teknis penyalurannya, siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut ?

.....  
.....  
.....

**B. Bendahara Desa Buntu Awo, Kec. Walenrang Utara, Kab. Luwu**

I. Identitas Diri

Nama :  
Jenis Kelamin :  
Usia :  
Pendidikan :

II. Daftar Pertanyaan

1. Berapa Dana Desa Yang Turun Dari Pemerintah Pusat dan DiAlokasikan untuk Apa aja Dana Tersebut? Tolong diberi penjelasannya.

.....  
.....

2. Bagaimana Proses pengelolaan Dana Desa?

.....  
.....

3. Program-Program apa saja yang di danai oleh Dana Desa tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat?

.....  
.....  
.....

4. Apakah ada kendala dari pelaksanaan pembangunan terkait dana desa, serta manfaatnya apa saja?

.....  
.....  
.....

5. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan pembangunan terkait dana desa?

.....  
.....  
.....

**C. Tokoh Masyarakat Desa Buntu Awo, Kec. Walenrang Utara, Kab.**

**Luwu**

**I. Identitas Diri**

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :

Pendidikan :

**II. Daftar Pertanyaan**

1. Bagaimana Transparansi Dana mengenai alokasi dana?

.....  
.....

2. Bagaimana mengenai partisipasi dari masyarakatnya?

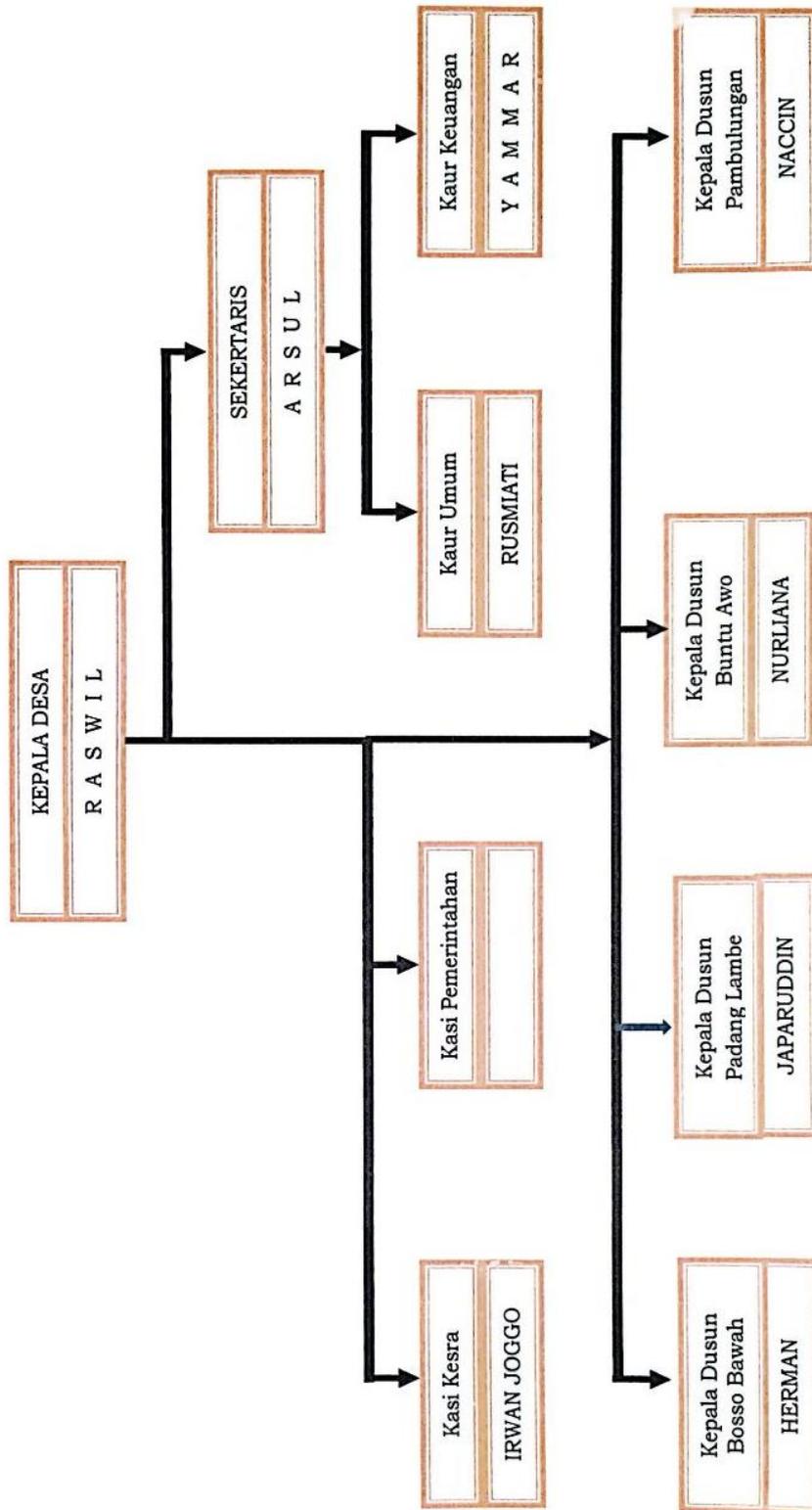
.....  
.....

3. Apakah dalam perencanaan pembangunan Desa melibatkan masyarakat?

.....  
.....  
.....

Lampiran 3: Data Kepala Desa dan Perangkat Desa

**Struktur Pemerintahan Desa Buntu Awo  
Periode Tahun 2022 sampai 2028  
Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu**



Lampiran 4: Data Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

DATA BPD DESA BUNTU AWO KECAMATAN WALENRANG UTARA

No	NAMA PERANGKAT	NIK	NO HP	TEMPAT LAHIR	KELAHIRAN			JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	SK PENGANGKATAN		JABATAN	KET.
					Tgl	Bln	Thn			Nomor	Tanggal		
1	SAINAL	7208042808700000	081355915617	PADANG	28	08	1970	L	SLTA	155/III/2020	05/03/2020	KETUA	LAMA
2	NIKRAM RONTA	7317160510890000	082350175815	BOSSO	05	10	1989	L	SLTA	155/III/2020	05/03/2020	WAKIL KETUA	LAMA
3	SURMAWATI	7317165202660000	085281766878	BOSSO	12	2	1992	P	SLTA	155/III/2020	05/03/2020	SEKERTARIS	LAMA
4	HAERUL	7317162104760000	082259123603	BOSSO	21	04	1976	L	SLTA	155/III/2020	05/03/2020	ANGGOTA	LAMA
5	AJILUDDIN	7317160812760000	081245376291	KONDO	08	12	1976	L	SLTA	155/III/2020	05/03/2020	ANGGOTA	LAMA
6	SUDIRMAN	7317162912850000	082332236662	BOSSO	29	12	1985	L	SLTA	155/III/2020	05/03/2020	ANGGOTA	LAMA
7	JUMITA	7317165506850000	085396851590	BOSSO	15	6	1985	P	S1	155/III/2020	05/03/2020	ANGGOTA	LAMA

Lampiran 5: Daftar Hadir Kegiatan Musarebang



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**KECEMATAN WALENRANG UTARA**  
**DESA BUNTU AWO**

Sekretariat : Jln. Trans Palopo-Masamba Km. 27, Tlp. (0471)..... Kode Pos 91952

DAFTAR HADIR

PERHAL : MUSAREMBANG  
 HARI/TANGGAL : RABU, 26-07-2025

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KARNAL	MARBUMU	KEUR	1
2	RASWIL	B. AWO	KADES	2
3	HAMID. SIMPA		RABINSA	3
4	SAINAL	B. BAWAH	TPD	4
5	ALFIN	DS. LIMBUNG	PLD	5
6	XAMMAR	DS. BAWAH	KAGI. PARTEN	6
7	SAMSIR			7
8	AKSAN		R. T	8
9	HARRUN HARTINDS BOSSO. B		KAMRA	9
10	HASPIANI	- - -		10
11	MEGAWAN	P. LAMBE	KADER	11
12	SADARIA	BOSSO BAWAH	KADER	12
13	WASMIATI	- - -	KPMO	13
14	WALLY TUNGGU	P. LAMBE	KAMRA	14
15	RANING	B. BAWAH	I. MESJID	15
16	HANU	P. CANGE	BPKD	16
17	NURLIANA	DSN: BUNTU AWO	KADUS	17
18	AJIL UDDIN	DSN: BUNTU AWO	ANG. BID	18
19	SUDIRMAN	DSN: BAMBULIMAN	BPD	19
20	TIPAYUNG	DSN: BOSSO BAWAH	KPMO	20
21	MUWARDANA	BOSSO - TIM	STAT. KEC	21
22	HERMANTO	B. BAWAH	KADES	22
23	NIKRAN. R.	B. AWO	BPD	23
24	MACEIN	DSN: PAMBULIMAN	KADUS	24
25	MUHAMMAD ZIKRAN. A	BOSSO	KAGI. KEC. AWO	25
26	KAWATI K	BOSSO	PLD	26
27	IRWAN JEGA	BUNTU AWO	KAW. REUB.	27
28	RUSMIATI	C. UMMU		28



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU  
KECEMATAN WALENRANG UTARA  
DESA BUNTU AWO**

Sekretariat : Jln. Trans Palopo-Masamba Km. 27, Tlp. (0471)..... Kode Pos 91952

**DAFTAR HADIR**

PERIHAL : MUYAWARAH BUMDES  
HARI/TANGGAL : Kamis, 27-02-2025

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	RASUTI	B. AWO	KADER	
2	SAINAL	Ps. Basso Bantu	BPD	
3	Alamsyah	Kendelcan	TAPM. Kabupaten	
4	Aurilla S.	Salutbu	PD	
5	ARSUL	B. AWO	Sekolah	
6	ALFIN	LIMBONTI	PLD	
7	NACCIN	DSK PAMBULUNGAN	KADUS	
8	HERMANTO S.	DS B. AWO		
9	Sulardi T	B. P. Lambaka	KAMPEN	
10	IRWAN	DS B. AWO		
11	NURUL FITRA MATTO	B. AWO		
12	AMELIA RIZKY RAWAN	TD. AWO		
13	RUSMIATI	-	KALIR	
14	MISNA		KADER	
15	MURSCIA	-	KADER	
16	MURCIGNA	KADUS	B. AWO	
17	HARTUL	BPD N. Lamba	BDD	
18	Supriyanti	Basso Bantu	BDD	
19	Ajilyddis	Dumbo Doro	BDD	
20	Primito	Padang Lamba	BPD	
21	Prakmana	Basso Bantu	Kadus	
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

## Lampiran 6: Daftar Usulan Musarembang

### MUSYAWARAH

MATERI : MUSREMBANG DESA TAHUN 2024  
TANGGAL : 16 JANUARI 2023  
TEMPAT : KANTOR DESA BUNTU AWO

#### SAMBUTAN II :

##### 1. KETUA BPD

\* MUSREMBANG DESA diayatkan Pengesahan Dokumen MUSREMBANG.

##### 2. KEPALA DESA BUNTU AWO

\* Dalam Melaksanakan Pembangunan harus tingkatkan Persatuan dan Kesatuan.

##### 3. CAMAT WALIKERANG UTARA

\* Sumbu Kepala Desa yang terpilih wajib menyusun kepala desa RPKM DES.

\* RPKM harus dan Desa Desa Menerkep.

1. Ketahanan Pangan 20%.
2. Ketahanan Energi
3. OPS Desa 3%
4. Psikik & Penderitaan

\*

##### 4. PENDAMPING Kecamatan

\* BLT ~~dan~~ Desa Desa TAHUN 2023

min 15% Maksimal 25%. Sesuai Utamanya Kemiskinan Elektrik.

### DESA

#### \* USULAN TAHUN 2024 \*

1. Pengaspalan Jalan Akses SMP I BOSSO
2. RABAT BETON Pelebaran 3500 (Buntawa & pdg. Lande)
3. Lampu Penerang Jalan 91 unit (3 DUSUN)
4. Pengadaan Mobil ambulans 1 unit (Pdg. Lande)
5. Pelebaran Jalan 10 km (Pacu Bulungan)
6. Pembentukan Badan Jalan 2000M (Bosso Kawali)
7. Pembentukan Jembatan Sempang 1 UNIT (Pacu Bulungan)

# MUSYAWARAH DESA DESA BUNTU AWO TAHUN 2025

MATERI : MUSREMBANG DESA TAHUN ANGGARAN 2026  
WAKTU : 24 Februari 2025  
TEMPAT : KANTOR DESA BUNTU AWO

## SAMBUTAN II :

### 1. Kepala desa Buntu Awo

- Kepala wal. & Bktif karena spring ada Per mintaan ada data
- Semai Program Bupati 2024-2025 akan gratis BPJS.

### 2. Kord BKBBN wal. UT :

- Pelayanan KB / capaian KB desa Buntu Awo berjalan dgn baik dan mencapai target yg ditetapkan pemerintah.
- St kasus starting ada 3 di desa Buntu Awo dengan 7 ibu hamil.
- Menekal di Usia Muda (Puber Guna) bisa menurunkan starting baru. Anomali diadukan pembedaan diusi.

### 3. Camat wal. UT :

- Kepala desa semoga mendapat Pende. Pembelaan masa jabatan di tahun. Balok. Suku juga dan Kepala desa Buntu Awo.
- Ketahanan pangan harus dikelola oleh BUMDES. (belum ada juknis)
- Pungutan harus pengikat desa hut mutlak Kepala Desa tanpa harus ada SP.

### 4. Korem Pendamping wal. UT :

- Usulan Musrembang dan ke Kecamatan serta Delegation.
- Dana Desa Mencalegi: Petemen Desa no. 2 Thn 2024
  - BLT, Penguatan Desa, Penguatan Suku kesetia.
  - Ketahanan pangan, Penguatan Fokus kesetia.
  - Desa, Penguatan Teknologi informasi, PKD (FISIK) (Hole 50%)
- + KEMEN 2024 Dan Dana Desa.
  - Ketahanan pangan 20% (BUMDES) = 1/68 Juta

### ~ USULAN II MUSREMBANG : ~

1. Pengaspalan Jalan SMP 3 Bosso.  
KURSUS Ke kantor Camat :

2. Talud Jalan Biam Bang. 1000 M

DSN. Padang Sambu

3. Pengkrikilas 1000 M + Plat Duker 2 Unit  
DSN. Pansu Lungun

4. DRAINASE + Pemasangan Tubing 1000 M  
DSN. Buntu Awo

5. Pagar Beton 1000 M.

DSN. Padang Sambu + DSN. Bossu Bawah.

## USULAN - USULAN JHN 2025

1. DUSUN Baseo Bantah  
- Tetap DRAINASE 200 M. RUMAH MEDAN ✓  
- DRAINASE 150 M SAMPING MEJID AL BEASARA X  
- PANG DUKER 1 UNIT DL. BANTARANG  
- PEMBULKAAN JALAN 1000 M.
2. DUSUN PANG LAMBE :
3. DUSUN Pambulangan :  
- TALUD Pohon 100 M  
- PLAT DUKER 3 UNIT TERUSAN MABOMONG ✓  
- GORONG - GORONG.
4. DUSUN BUNTAL :  
- TALUD JALAN 300 M  
- R. BETON 300 M  
- Pengerasan JALAN
5. STANTING  
- PENGAPARAN MOBIL 1. SIAGA. ✓
6. USULAN BPD  
- PENGAPARAN BAJU BPD + LEPTOP + KURSI + MEJA.
7. LAPTOP KPM. ✓

Lampiran 7: Anggaran Desa Buntu Awo

## Realisasi APBDes Buntu Awo Tahun Anggaran 2022

KECAMATAN WALENRANG UTARA KAB. LUWU, PROV. SULAWESI SELATAN

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG (RP.)
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Transfer	1.167.320.893,00	1.169.738.850,00	2.417.957,00
Dana Desa	812.619.000,00	812.619.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	13.886.893,00	15.504.850,00	2.417.957,00
Alokasi Dana Desa	341.615.000,00	341.615.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	781.952,00	1.035.361,00	253.411,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.168.192.845,00</b>	<b>1.170.774.213,00</b>	<b>2.671.368,00</b>
<b>BELANJA</b>			
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	366.868.655,00	366.864.400,00	4.255,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	166.500.393,00	166.451.435,00	48.958,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	66.300.000,00	66.300.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	177.340.000,00	177.340.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	410.400.000,00	410.400.000,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.187.409.048,00</b>	<b>1.187.355.835,00</b>	<b>53.213,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(19.306.203,00)</b>	<b>(16.581.835,00)</b>	<b>(2.724.581,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>			
Penerimaan Pembiayaan	19.306.203,00	19.306.203,00	0,00
Pembiayaan Netto	19.306.203,00	19.306.203,00	0,00
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>	<b>0,00</b>	<b>2.724.581,00</b>	<b>(2.724.581,00)</b>

**Drs. H.BASMIN MATIYANG, M.Pd**  
BUPATI LUWU

**SYUKIR BILAK**  
WAKIL BUPATI LUWU

**Kasmardudin, S.Sos.**  
Kepala Desa Buntu Awo  
Pangkat : Pembina  
NP : 897890320091001

**Raswil**  
Kepala Desa Buntu Awo

## Realisasi APBDes Buntu Awo Tahun Anggaran 2023

KECAMATAN WALENRANG UTARA KAB. LUWU, PROV. SULAWESI SELATAN

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG (RP.)
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Transfer	1.167.320.893,00	1.169.738.850,00	2.417.957,00
Dana Desa	812.619.000,00	812.619.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	3.086.893,00	15.504.850,00	2.417.957,00
Dana Desa	341.615.000,00	341.615.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	781.952,00	1.035.361,00	253.411,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.168.192.845,00</b>	<b>1.170.774.213,00</b>	<b>2.671.368,00</b>
<b>BELANJA</b>			
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	366.868.655,00	366.864.400,00	4.255,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	166.500.393,00	166.451.435,00	48.958,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	66.300.000,00	66.300.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	177.340.000,00	177.340.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	410.400.000,00	410.400.000,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.187.409.048,00</b>	<b>1.187.355.835,00</b>	<b>53.213,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(19.306.203,00)</b>	<b>(16.581.835,00)</b>	<b>(2.724.581,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>			
Penerimaan Pembiayaan	19.306.203,00	19.306.203,00	0,00
Pembiayaan Netto	19.306.203,00	19.306.203,00	0,00
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>	<b>0,00</b>	<b>2.724.581,00</b>	<b>(2.724.581,00)</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>	<b>0,00</b>	<b>15.576.925,00</b>	<b>-15.576.925,00</b>

**Drs. H. MUH. SALEH, M.Si**  
BUPATI LUWU

**Kasmardudin, S.Sos**  
Kepala Desa Buntu Awo

**RASWIL**  
KEPALA DESA BUNTU AWO

## APBDes Buntu Awo Tahun Anggaran 2024

KECAMATAN WALENRANG UTARA KAB. LUWU, PROV. SULAWESI SELATAN

<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA :</b>	Rp. 426.567.370	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA :</b>	Rp. 502.392.851
- Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional	Rp. 393.787.000	- Sub Bidang Pendidikan	Rp. 24.000.000
- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp. 43.800.000	- Penyelenggaraan PAUD/TK/PA/ Madrasah Non Formal	Rp. 15.000.000
- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp. 223.200.000	- Penelitian/Perangkat Milik Desa	Rp. 1.800.000
- Operasional Pemerintah Desa	Rp. 25.954.000	- Penyelenggaraan Pembangunan Desa (Insentif, KPMK)Rp.	Rp. 7.200.000
- Penyediaan Tunjangan BPD	Rp. 55.800.000	- Sub Bidang Kesehatan	Rp. 36.000.000
- Operasional BPD	Rp. 2.016.000	- Penyelenggaraan Honor Bidan Desa	Rp. 7.800.000
- Insentif/Operasional RT/RW	Rp. 14.400.000	- Penyelenggaraan Posyandu (Insentif Kader)	Rp. 9.000.000
- Operasional Pemdes Yang Bersumber Dari DD (3%)	Rp. 25.954.000	- Penyelenggaraan PPKG	Rp. 1.800.000
- Pembayaran Ujrah Bulanan Staf Pemerintah Desa dan BPD	Rp. 13.500.000	- Insentif KPM	Rp. 8.400.000
<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan sipil, Statistik &amp; Kearsipan</b>	<b>Rp. 6.000.000</b>	- Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 442.281
- Penyusunan, Pendaftaran dan Penutakhiran Profil Desa	Rp. 6.000.000	- Pemeliharaan Jalan Desa (Perkerasan Sirtu dan Talut Jalan)	Rp. 248.241.000
<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>Rp. 6.000.000</b>	- Pemeliharaan Saluran air (Normalisasi Saluran)	Rp. 168.247.000
- Penyelenggaraan Musyawarah Desa/Perencanaan Desa/ Pemb. APBDes	Rp. 3.670.000	- Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Rp. 25.141.851
- Penyusunan dokumen Perencanaan Desa	Rp. 3.100.000	<b>Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	Rp. 450.000
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDes Desa)	Rp. 3.230.000	- Pembuatan/Cetak Poster/Balho APBDes	Rp. 650.000
- Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Rp. 5.330.000	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	Rp. 78.400.000
- Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkaldes & BPD	Rp. 22.000.000	- Sub bidang Kelembutan, Keterbacaan dan Perilaku Masyarakat	Rp. 32.400.000
		- Sub bidang Kebudayaan dan Kesegaran	Rp. 44.200.000
		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKATAN</b>	Rp. 172.242.000
		- Sub bidang Pertanian dan peternakan	Rp. 187.251.000
		- Pengadaan Pakup Unguk	Rp. 19.200.000
		- Pembangunan Saluran Irigasi	Rp. 153.742.000
		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADILAN DARURAT &amp; MENDESAK DESA:</b>	Rp. 90.000.000
		- Sub bidang Keadilan Menendes (BLT Dana Desa)	Rp. 90.000.000

**Drs. H. MUH. SALEH, M.Si**  
BUPATI LUWU

**PENDAPATAN**  
Rp. 1.248.721.851

**DANA DESA**  
Rp. 865.147.000

**BAGI HASIL PAJAK**  
Rp. 25.141.851

**ALOKASI DANA DESA**  
Rp. 358.433.000

**BELANJA**  
Rp. 1.248.721.851

**Kasmardudin, S.Sos**  
Kepala Desa Buntu Awo

**RASWIL**  
KEPALA DESA BUNTU AWO

*Lampiran 8: Dokumentasi*



Foto Bersama Kepala Desa Dan Aparat Desa



Wawancara Kepada Bapak Dahlan Toko Agama



Wawancara Kepada Bendahara Desa



Wawancara Kepada Sekertaris Desa



Musarembang Desa



Pembuatan rainase menggunakan dana alokasi desa



Pengerokan sungai menggunakan alokasi dana desa

## RIWAYAT HIDUP



**Amrira Sari**, lahir di Buntu Awo pada tanggal 03 November 2003.

Penulis merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan seorang Ayah bernama Amir Dopang dan ibu bernama Rosmawati.

Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Buntu Awo Kec.Walenrang Utara Kab, Luwu. Pendidikan dasar penulis

diselesaikan pada tahun 2014 di SD 493 Bosso. Kemudian, ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 1 Bosso hingga tahun 2017. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di SMAN 9 Luwu. Di tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan S1 di program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.